

Vol I. No. 1 September 2010



MAJALAH LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

VETERAN

DARI VETERAN OLEH VETERAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA



HARI VETERAN NASIONAL 10 AGUSTUS 2010

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL LVRI 2010

SIDANG UMUM VECONAC 2010

ISSN 2087-3530



9 772087 353010



Salah seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan yang pernah ikut bertempur melawan penjajah di tahun 1945-1949 sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini tetap tegak sampai sekarang.

Diunduh dari : blog-wandi.blogspot.com/2010/08/veteran-yang-terlupakan.html

Penerbit
 DEWAN PIMPINAN PUSAT LVRI
 DPP LVRI
 Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 50
 Jakarta 12930
 Telp. (021) 5254105, 5252449, 25536744
 Fax. (021) 5254137

Pembina/Penasehat
 Rais Abin - Ketua Umum DPP LVRI
 Gatot Suwardi - Wakil Ketua Umum I DPP
 LVRI
 HBL. Mantiri - Wakil Ketua Umum II DPP
 LVRI
 Soekotjo Tjokroatmodjo - Wakil Ketua
 Umum III DPP LVRI

Pemimpin Umum / Penanggung Jawab
 Wahyono S.K. - Sekretaris Jenderal DPP
 LVRI

Dewan Redaksi
 Zainal Abidin
 Bantu Hardjijo
 Nono Sukarno
 F.X. Soejitno
 Sumartono
 Ismu Edi Ismakun
 O.H. Wello
 Ninik Sri Sapartinah
 Alwin Nurdin

Pemimpin Redaksi
 H.A. Aziz. M

Redaksi Pelaksana
 Dasman Djamaluddin, SH, M.Hum

Tata Usaha
 Johanis Papalangi

Sekretaris Redaksi
 Jatu Rahmawati, S.Sos

Dicetak oleh
 PT. JEKAMAS, JAKARTA



Sampul Depan :
*Ketua Umum DPP LVRI
 Letjen TNI (Purn) Rais
 Abin*

Sampul Belakang :
*Monumen "Radio Rimba
 Raya" Takengon-Aceh
 Tengab*

Salam Redaksi

Akhirnya Majalah Merah Putih yang telah dinanti-nanti para Veteran sampai ke tangan pembaca. Majalah ini selain menjelaskan keadaan dan kegiatan para Veteran dan organisasinya, yaitu Legiun Veteran Republik Indonesia, juga menyampaikan pikiran dan harapan para Veteran terhadap masa depan bangsa dan negaranya.

Tulisan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan akan selalu mewarnai isi majalah ini, karena bangsa yang tidak mengenal sejarahnya akan runtuh. Liputan tentang daerah dan kegiatan para Veterannya akan mengungkap kehidupan para Veteran dan kegiatannya.

Semoga majalah ini dapat memenuhi harapan para pembaca.

Redaksi

Daftar Isi

Salam Redaksi	3
Dwi Fungsi di Mata Rais Abin	4
10 Agustus Hari Veteran Nasional	5
Sejarah Perjuangan :	
a. Rengasdengklok 1945	6
b. Keabsahan Proklamasi 17-08-1945	10
c. Bojongsokosan 1945	15
d. Serangan Umum Solo 1949	20
Menjadikan Pancasila Kenyataan	23
Veteran Dalam Gambar	29
MUKERNAS LVRI 2010	33
Diskusi Panel 2010 :	
Berakhirnya RIS Kembali ke NKRI (Sayidiman Suryohadiprojo)	37
Sidang Umum VECONAC 2010	44
Obrolan ESB (Ekonomi, Sosiak, Budaya)	48
Laporan Daerah :	
a. Aceh	50
b. Ciamis	52
Jalan Menuju Puncak	55
Surat Telegram Markas Besar TNI	57
Gugur Bunga	58

DWI FUNGSI DI MATA RAIS ABIN

OLEH RAIS ABIN

Sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan tidak pernah terpikir oleh saya bahwa Dwi Fungsi merupakan hasil pemikiran Jenderal Abdul Haris Nasution. Berjalannya perjuangan kemerdekaan merupakan usaha integratif/terpadu, yang meskipun kadang-kadang terlihat *disorganized*, ternyata membawa hasil nyata. Inilah latar belakang Dwi Fungsi. Ini juga terlihat ketika sejumlah perwira Pembela Tanah Air (PETA) bersama para pemuda (Chairul Saleh dan kawan-kawan) membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia.

Baik sewaktu bertugas sebagai penyelundup alat perang di tahun 1946-1948 dan kaitannya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah se-Sumatera bagian Timur/Selatan, saya mengutamakan saling mengamankan posisi para partner (Kepala Daerah) agar kedua pihak tetap tanpa terganggu dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

Semangat murni kemerdekaan merupakan perekat dan seolah mengaburkan apa yang disebut Dwi Fungsi.

Jenderal T.B.Simatupang memang salah satu pemikir TNI, tetapi dengan segala *respect* agak sulit menyebut Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Jenderal Lapangan, kiranya lebih tepat dikategorikan sebagai penulis dasar-dasar gerilya.

Dengan pengangkatan *ala adhoc* diwaktu itu beliau dipercayakan membawahi para perwira pejuang lapangan seperti Hidayat, Gatot Subroto, Sarbini, Kawilarang, dan Zulkifli Lubis,



Rais Abin

sehingga posisi beliau masih tetap menggalang pemikiran-pemikiran.

Perkembangan politik Indonesia berkaitan dengan kepemimpinan Soekarno sudah merupakan pengetahuan umum. Haris Nasution tidak pernah merupakan saingan yang berarti bagi Soekarno dan malahan dijadikan alat menghadapi pertumbuhan partai-partai yang potensial dapat membahayakan posisinya.

Ini tambah kelihatan setelah terbunuhnya tokoh-tokoh utama Angkatan Darat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam mana kesempatan terbuka bagi Nasution untuk berprakarsa. Keraguan menantang Soekarno merupakan ke keliruan fatal beliau. Soeharto berhasil memanfaatkan apa yang diwarisinya menyangkut Dwi Fungsi sebagai refleksi dari kekurangan dinamika institusi Eksekutif/Legislatif pasca Gestapu dan penyelesaian *konfrontasi* dengan Malaysia.

Dwi Fungsi lahir dari sejarah perjuangan bangsa yang menganggap keterpaduan sebagai syarat mutlak. Bahwa akhirnya berlanjut, tidak terlepas dari "*expediency*"-nya di mata pimpinan nasional dewasa itu.

TANGGAL 10 AGUSTUS 1949 HARI VETERAN NASIONAL

Tanggal 10 Agustus 1949 merupakan hari yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia karena hari itu adalah hari disepakatinya persetujuan gencatan senjata antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yang berlaku mulai tanggal hari itu pukul 24.00. Namun demikian pertempuran TNI melawan tentara Kerajaan Belanda belum berakhir di hari itu, karena *Serangan Oemoem* merebut kembali kota Solo yang sudah dimulai sejak tanggal 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Letkol Slamet Rijadi masih terus berlanjut menggusur tentara Kerajaan Belanda keluar Solo. Pertempuran sengit terus berkobar dari pagi sampai tengah malam tanggal 10 Agustus 1949. Pukul 24.00 baru semua pihak yang terlibat menghentikan pertempuran.

Dari buku biografi Letkol Slamet Rijadi yang ditulis oleh Julius Pour (2008) antara lain dapat dikutip tentang peristiwa besar itu sebagai berikut (halaman 172, 178, 179) :

.....

Dalam suasana lapangan masih panas dan setiap hari pertempuran belum juga berhenti, mendadak pada tanggal 3 Agustus 1949 Panglima Besar Letnan Jenderal Soedirman mengirim sebuah radiogram. "Berdasar persetujuan Pemerintah Republik dan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka Presiden/Panglima Tertinggi memerintahkan gencatan senjata akan berlaku di Jawa sejak tanggal 11 Agustus, sedangkan di Sumatera mulai tanggal 15 Agustus 1949".

Tetapi, radiogram Panglima Besar yang secara tersirat memastikan mengenai jadwal gencatan senjata oleh Slamet Rijadi dinilai sebagai "keharusan untuk berpacu dengan waktu". Pukul 10.00 tanggal 8 Agustus 1949 dia mengeluarkan Perintah Siasat No 012/Co.PPS/49. "Segera laksanakan *afscheids aanval* (serangan perpisahan) ke Kota Solo secara besar-besaran."

Perintah Slamet Rijadi menetapkan, "Pukul 05.00 tanggal 10 Agustus seluruh pasukan sudah harus berada di dalam kota. Pukul 06.00 serangan

dimulai. Pukul 16.00 selesai. Pukul 24.00 semua pertempuran sudah harus berhenti, tidak ada lagi gerakan militer agar bisa memenuhi instruksi Panglima Tertinggi."

Catatan yang diterbitkan Kerukunan Eks Anggota Detasemen II, Brigade 17 melukiskan, "Puncak serangan terjadi tanggal 10 Agustus dengan ikut sertanya Pasukan TNI Brigade V, dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Slamet Rijadi. Pasukan dari luar kota ini segera terjun ke pertempuran, menyerbu markas pasukan Belanda. Sejak pagi sampai tengah malam mereka bahu-membahu dengan para TP, menghajar semua pertahanan pasukan Belanda."

Lebih lanjut disebutkan, "Pertempuran berhenti tepat pukul 24.00 tengah malam karena sejak saat itu secara resmi sudah mulai berlaku kesepakatan gencatan senjata. Dalam keheningan malam, rakyat segera berbondong-bondong keluar rumah, menyaksikan bendera Merah Putih dikibarkan di segala sudut kampung dan tiang-tiang listrik. Lagu-lagu perjuangan secara spontan dinyanyikan oleh para pejuang yang merasa puas karena mereka sudah ikut menyumbangkan darma baktinya kepada Tanah Air."

.....

Gencatan senjata antara TNI dengan tentara Kerajaan Belanda telah mengakhiri perjuangan panjang menegakkan dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kokohnya. Hari bersejarah tanggal 10 Agustus 1949 itu kemudian ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Veteran Nasional.

Pada Peringatan Hari Veteran Nasional tahun 1965, Presiden Soekarno berpesan: "*Tanggal 10 Agustus adalah hari peringatanmu, Hari Veteran Nasional. Memang Veteran adalah milik Nasional. Satu gelar agung yang dianugerahkan oleh rakyat kepadamu sebagai penghargaan atas perjuangan dan pengorbananmu di masa Revolusi Fisik.*"

Catatan Redaksi

PERISTIWA RENGASDENGKLOK SEBAGAI JIWA DAN SEMANGAT TNI

OLEH WAHYONO S.K

Setiap kali akan merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, selalu terlintas dalam ingatan kita foto peristiwa bersejarah pengibaran Sang Merah Putih di halaman depan rumah jalan Pegangsaan Timur 56 setelah Bung Karno di dampingi Bung Hatta membacakan teks Proklamasi. Sang Merah Putih ditarik naik oleh dua anak muda, seorang prajurit Tentara PETA dan seorang pemuda bercelana pendek, disaksikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta serta sejumlah hadirin laki-laki dan perempuan. Foto itu menggambarkan persatuan seluruh unsur kekuatan bangsa Indonesia untuk berkibarnya Sang Merah Putih.

Tentara dan pemuda harus selalu bersatu, karena memisahkan pemuda dari tentara akan melemahkan bangsa dan negara. Hadirnya tentara dan pemuda dalam upacara pengibaran Sang Merah Putih yang bersejarah itu bukanlah suatu peristiwa kebetulan, tetapi karena merekalah aktor-aktor yang merencanakan dan menggerakkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di saat vakum kekuasaan Jepang dan Sekutu di Indonesia.

Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan berakhir perang di Pasifik. Berita tentang kekalahan Jepang itu tidak segera diketahui oleh masyarakat di daerah-daerah yang diduduki Jepang, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945 keesokan harinya masih banyak yang ragu-ragu tentang kebenaran berita itu, tidak terkecuali di kalangan para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta. Namun demikian beberapa pemuda, antara lain Yusuf Kunto, Chairul Saleh dan Sukarni, sudah menangkap siaran radio Sekutu tentang takluknya Jepang dan berakhirnya perang.

Rapat Pemuda dan Tentara PETA

Tanggal 15 Agustus 1945 sore hari markas Tentara PETA (Pembela Tanah Air) di Jakarta dihubungi Yusuf Kunto, salah seorang pemuda



Kerjasama yang erat antara pemuda dan tentara melahirkan NKRI

yang bermarkas di Menteng 31, untuk mengajak rapat bersama malam harinya. Cudanco (komandan kompi) Latief Hendraningrat menunjuk Sodanco (komandan peleton) Singgih untuk menerima ajakan para pemuda itu. Sodanco Singgih berangkat bersama Sodanco Sutrisno dan Sodanco Sampun. Para pemuda yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Jusuf Kunto, Chairul Saleh, Sukarni dan Wikana. Mereka semua ternyata sudah saling kenal.

Para pemuda itu bertekad untuk segera mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Keadaan sudah sangat genting, Jepang sudah menyerah tetapi Indonesia belum merdeka, kalau sampai terlambat Indonesia bisa dijajah oleh Sekutu atau dikembalikan kepada Belanda. Wikana melaporkan bahwa Soekarno dan Hatta belum bersedia mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan sekarang, karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang baru akan bersidang besok tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda tidak sependapat karena PPKI adalah bentukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di luar campur tangan Jepang.

Rapat memutuskan agar Sodanco Singgih dan kawan-kawan dari Tentara PETA Jakarta menyakinkan Soekarno dan Hatta tentang kesiapan

para pemuda, rakyat dan Tentara PETA untuk mendukung Proklamasi Kemerdekaan secepatnya. Maka tanggal 16 Agustus 1945 dini hari tiga Sodanco, Singgih, Sutrisno dan Sampun ditemani Sukarni membawa Soekarno dan Hatta ke luar Jakarta menuju markas kompi Tentara PETA di Rengasdengklok kurang lebih 100 km sebelah timur Jakarta. Sodanco Singgih adalah pelatih Soekarno dalam suatu latihan militer sebelumnya, sehingga tidak ada kesulitan untuk mengajak pergi Soekarno.

Markas kompi Tentara PETA di Rengasdengklok termasuk kompi yang lengkap personil dan persenjataannya dan para komandannya, yaitu Cudanco Subeno dan Sodanco Umar Bahsan dikenal baik oleh Sodanco Singgih sebagai anti Jepang dan siap mendukung kemerdekaan Indonesia. Jauh hari sebelumnya yaitu tanggal 15 Juni 1945, para perwira dipimpin Cudanco dr Sutjipto, pernah mengadakan rapat rahasia anti Jepang. Untuk diketahui, para Sodanco Tentara PETA berasal dari para tokoh pemuda dan mahasiswa, oleh karena itu semangat juangnya sangat tinggi sekali tentang Indonesia merdeka, seperti para pemuda yang bermarkas di Menteng 31 dan Cikini 71 Jakarta. Di samping itu Rengasdengklok jauh dari pengawasan Jepang karena markas batalyon Tentara PETA ada di Purwakarta.

Demikian, cukilan sejarah yang dapat kita baca dari buku-buku tentang Tentara PETA yang ditulis oleh Purbo S. Suwondo, Pamoe Rahardjo dan Setiadi Kartohadikusumo, yang juga mantan Perwira PETA.

PPKI dan Tentara PETA

PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai Soekarno dan wakilnya Hatta. Kedua pemimpin itu pada tanggal 12 Agustus 1945 dipanggil menghadap Marsekal Terauchi Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, di Dalat kira-kira 300 km sebelah utara Saigon. Pada pertemuan singkat itu Marsekal Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno dan Hatta menerimanya dengan perasaan gembira dan meminta izin untuk melaksanakan tugasnya mulai tanggal 25 Agustus 1945. Demikian ditulis Hatta dalam bukunya,

Sekitar Proklamasi. Agaknya Sukarno dan Hatta pada waktu itu belum mengetahui bahwa Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom Sekutu dan takluknya Jepang tinggal menunggu hitungan hari.

Tentara PETA adalah juga buatan Jepang berdasarkan Osamu Seirei (Surat Keputusan) No. 44 tanggal 3 Oktober 1943, tetapi bentuknya adalah kesatuan-kesatuan tentara sukarela yang disiapkan untuk membela tanah air sendiri terhadap serangan musuh dari luar. Dari bulan November 1943 sampai bulan Agustus 1945 telah terbentuk 66 batalyon di Jawa dan 3 batalyon di Bali, atau sama dengan satu batalyon di tiap kabupaten, sedang di Sumatera terbentuk 50 kompi atau satu kompi di tiap kabupaten. Sekiranya waktunya cukup, pasti akan dibentuk juga di pulau-pulau yang lain.

Pembentukan tentara sukarela PETA tidak sepenuhnya atas inisiatif Jepang, tetapi karena desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan yang diperkuat dengan petisi Gatot Mangkupraja yang ditulis dengan darahnya sendiri. Tentara PETA berbeda dengan kesatuan-kesatuan paramiliter yang sudah ada, seperti Heiho (pembantu tentara), Seinendan (barisan pemuda), Keibodan (pembantu polisi), Suishitai (barisan pelopor) dan Gakutotai (barisan pelajar). Demikian pula Tentara PETA berbeda dengan KNIL bentukan Belanda, karena KNIL hanya untuk tugas-tugas keamanan melindungi kepentingan Belanda terhadap gangguan pribumi. Sedangkan Tentara PETA yang sifatnya sukarela disiapkan dan dilatih untuk dapat bertempur menghadapi serangan militer dari luar.

Bersatunya Politik dan Militer

Melalui pembentukan Tentara PETA, para pemuda Indonesia secara massal dan serentak diberi kemahiran militer yang tersebar merata di tiap kabupaten. Sampai bulan Agustus 1945 kekuatan itu berjumlah lebih dari 81 batalyon atau setara 5 divisi, suatu jumlah yang hampir sama dengan kesatuan operasional TNI AD sekarang. Tentara PETA secara sosiologis adalah suatu kekuatan pemuda yang telah memiliki kesadaran politik tentang kemerdekaan Indonesia serta mendapati latihan kemiliteran yang cukup sehingga siap dan mahir untuk bertempur, bertahan dan menyerang. Pada para prajurit dan perwira Tentara PETA inilah cita-cita perjuangan politik dan cita-cita perjuangan

bersenjata untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia bertemu dan berpadu. Pemberontakan Tentara PETA di Blitar yang dipimpin Sodanco Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1945 adalah bukti konkritnya.

Djatikusumo mantan Kepala Staf TNI AD yang pernah mendapat pelatihan KNIL dan Tentara PETA, mengatakan bahwa dari Tentara PETA ia telah mendapatkan yang tidak diperolehnya dari KNIL, yaitu bagaimana membangun tentara dari nol (*how to build an army from scratch*). N.J. Benda dalam bukunya *The Crescent and the Rising Sun*, menulis bahwa “ Dari berbagai organisasi pemuda di jaman Jepang dan terutama dari Tentara PETA, telah tumbuh tipe pemimpin baru (*a new type of leader*), yang akan menjadi personil militer yang terlatih yang sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah. Sedangkan J.C. Lebra dalam bukunya *Japanese Trained Armies in South east- Asia*, menulis bahwa” Pembentukan dan pelatihan Tentara PETA dan beberapa kesatuan para-militer memberikan aspirasi Indonesia suatu kemampuan revolusi. Tentara PETA secara khusus diketahui memiliki tehnik-tehnik militer untuk menjadikan revolusi suatu realita.” Sejarah memang mengungkapkan bahwa tidak ada revolusi yang dapat diwujudkan tanpa kemampuan dan kekuatan militer, seperti ditunjukkan oleh George Washington, Napoleon Bonaparte, Wladimir Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh dan Sudirman.

Proklamasi Kemerdekaan

Tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari di Rengasdengklok di hadapan para pejabat pemerintah daerah dan Tentara PETA setempat diadakan upacara penurunan bendera Jepang dan pengibaran bendera Merah Putih dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara dipimpin oleh Camat Hadipranoto dan disaksikan Cudanco Subeno dan para perwira Tentara PETA lainnya. Suasana kemerdekaan meliputi seluruh Rengasdengklok.

Kepada Soekarno dan Hatta oleh para Perwira PETA yang membawa kedua pemimpin itu ke Rengasdengklok diyakinkan bahwa seluruh pemuda, rakyat dan Tentara PETA siap untuk membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus segera diproklamasikan tanpa

menunggu ijin pemerintahan Jepang. Dampaknya di dunia internasional akan lebih menguntungkan bagi perjuangan bangsa Indonesia dari pada kalau kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang.

Menjelang sore hari rombongan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah ada kesepakatan dengan Cudanco Subeno dan para perwira Tentara PETA yang membawa mereka ke Rengasdengklok, bahwa Soekarno dan Hatta akan mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan besok pagi sebelum tengah hari.

Demikianlah maka sejarah mencatat bahwa keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi hari Soekarno didampingi Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur 56 di hadapan sejumlah pemuda pemimpin pergerakan kemerdekaan, beberapa Tentara PETA dari kompi Latief Hendraningrat, dan rakyat dari sekitarnya. Setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan pengibaran bendera Merah Putih oleh seorang prajurit Tentara PETA dan seorang pemuda dan selanjutnya ditutup dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara berjalan dengan khidmat dan lancar dengan penjagaan yang ketat oleh satu kompi Tentara PETA yang dipimpin Cudanco Latief Hendraningrat dan para Sodanco-nya Saleh Tedjakusuma, Sanusi, Sutrisno dan Mujrimi. Teks Proklamasi segera disiarkan ke seluruh dunia.

Meskipun terjadi banyak perbedaan persepsi tentang pengaruh peristiwa Rengasdengklok terhadap pelaksanaan tanggal dan cara pengumuman Proklamasi Kemerdekaan, seperti Soekarno dan Hatta dalam buku masing-masing mencoba meremehkannya, namun ada empat hal yang pasti yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa *pertama*, peristiwa itu benar terjadi dan melibatkan para pemimpin Soekarno dan Hatta serta sejumlah pemuda dan perwira Tentara PETA, *kedua*, sebelum dibawa ke Rengasdengklok kedua pemimpin Soekarno dan Hatta masih berpikir tentang Indonesia merdeka yang direstui pemerintah Jepang sebagaimana disampaikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat tanggal 12 Agustus 1945 sehingga pelaksanaannya harus dibicarakan dulu dalam rapat PPKI, *ketiga*, setelah dari Rengasdengklok kedua pemimpin Soekarno dan Hatta siap untuk

membacakan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi hari tanpa ijin pemerintahan Jepang, maka bagaimanapun juga Peristiwa Rengasdengklok telah menyelamatkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tuduhan pemberian Jepang, dan *keempat*, sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan telah ada hubungan yang erat dan komitmen bersama antara para pemuda Indonesia yang bersenjata dan yang tidak bersenjata untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atas kekuatan sendiri.

Beberapa tahun kemudian Bung Hatta menulis surat kepada Latief Hendraningrat, menyatakan bahwa Peristiwa Rengasdengklok mempunyai arti yang sangat penting bagi terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jiwa dan Semangat TNI

Semangat perjuangan para pemuda sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 untuk mewujudkan suatu negara bagi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, adalah semangat dan komitmen yang terus menyala di dada setiap pemuda. Jalan manapun yang kemudian mereka tempuh, perjuangan bersenjata, perjuangan politik, perjuangan ekonomi, maupun perjuangan sosial budaya, tidak akan meninggalkan semangat dan komitmen tersebut. Keempat jalan perjuangan itu saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Semangat perjuangan yang ditunjukkan para pemuda dan para prajurit Tentara PETA dalam Peristiwa Rengasdengklok merupakan sumber yang menjiwai perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya, yaitu bangsa yang merdeka karena kekuatan sendiri dan secara bersama seluruh unsur kekuatan bangsa akan mewujudkan masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur.

Tentara PETA yang oleh Pemerintah Jepang dibubarkan pada tanggal 19 Agustus 1945, telah memenuhi panggilan Pemerintah RI untuk pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi cikal bakal TNI. Nama-nama besar perwira tinggi TNI mulai dari Panglima Besar Sudirman sampai dengan para komandan pasukan di lapangan besar dan kecil umumnya adalah para mantan anggota Tentara PETA. Oleh karena itu wajar apabila



*Sebelum berpisah dengan diri Linggih,
penculik saya dan almarhum Bung Hatta
30 tahun yang lalu ke Rengasdengklok
sebuah sumbuhan yang merupakan satu
jasa besar bagi ketepatan Proklamasi
Kemerdekaan Bangsa dan Rakyat Indonesia
dan lahirnya Negara Pancasila Republik
Indonesia*

Hatta

semangat perjuangan para anggota Tentara PETA kemudian menjiwai TNI, bahkan menjadi jatidirinya sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit yang mengabdikan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, karena TNI tidak hanya mengawal tetapi justeru ikut mendirikan Republik ini.

Semangat perjuangan yang demikian itu telah menjadi jiwa dan semangat TNI yang tidak hanya bertanggungjawab terhadap masalah-masalah pertahanan dan keamanan saja, tetapi juga terpanggil untuk ikut bertanggungjawab terhadap masa depan, bangsa dan negara. TNI akan senantiasa berada di depan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara.

KEABSAHAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

OLEH BATARA R. HUTAGALUNG

(Ketua Umum Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia)

Sampai hari ini, pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui *de jure* kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17-8-1945. Bagi pemerintah Belanda, *de jure* kemerdekaan Indonesia adalah 27-12-1949, yaitu pada waktu “pelimpahan kedaulatan” (*soevereinetietsoverdracht*) dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Beberapa hasil KMB antara lain:



Soekarno membacakan Teks Proklamasi

1. Pembentukan Uni Indonesia – Belanda, di mana kepala Uni tersebut adalah Ratu Belanda.
2. RIS yang dipandang sebagai kelanjutan pemerintah Hindia – Belanda, diharuskan membayar utang pemerintah India - Belanda kepada pemerintah Belanda sebesar 4 ½ milyar *gulden*. Di dalamnya termasuk biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia – Belanda untuk membiayai agresi militer I, 21 Juli 1947 dan agresi militer II, 19 Desember 1948. Utang tersebut dicicil dan telah dibayar sebesar 4 milyar *gulden*, sebelum dihentikan oleh pemerintah Republik Indonesia tahun 1956.

3. Mantan tentara KNIL yang ingin masuk TNI harus diterima. Di tahun 70-an, beberapa orang yang sampai tahun 1949 masih bertempur di pihak Belanda, mencapai pangkat jenderal dan berada di pucuk pimpinan TNI.

Pada 16 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan pada 17-8-1950, Presiden Soekarno menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan RI, yang proklamasi kemerdekaannya adalah 17-8-1945. Dengan demikian, negara federal RIS yang diakui *de jure* oleh Belanda sudah tidak ada, dan pemerintah Belanda kini berhubungan dengan NKRI yang proklamasi kemerdekaannya adalah 17-8-1945.

Pada tahun 1956, pemerintah RI secara sepihak membatalkan Perjanjian KMB. Selain itu, pemerintah RI juga memutuskan untuk menghentikan pembayaran sisa utang yang harus dibayar sebesar sekitar 500 juta *gulden*. Pada saat itu, dari jumlah 4 ½ milyar *gulden*, telah dibayar sebesar 4 milyar.

Pada 20 Mei 2005, satu LSM, Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), yang didirikan oleh para aktifis LSM Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI), menyampaikan petisi kepada Perdana Menteri Belanda Jan P. Balkenende dan menuntut pemerintah Belanda untuk:

1. Mengakui *de jure* kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945,
2. Meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, pelanggaran HAM, kejahatan perang dan kejahatan terhadap

kemanusiaan, terutama yang dilakukan oleh tentara Belanda selama agresi militernya di Indonesia antara tahun 1945 – 1950,

Sejak KUKB menangani kasus pembantaian 431 penduduk desa Rawagede (kini bernama Balongsari) yang dilakukan oleh tentara Belanda pada 9 Desember 1947, maka tuntutan kepada pemerintah Belanda ditambah:

3. Memberi kompensasi kepada keluarga korban agresi militer Belanda.

Pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Menlu Belanda (waktu itu) Ben Bot menyatakan, bahwa pemerintah Belanda kini menerima proklamasi kemerdekaan RI 17.8.1945 secara moral dan politis, serta menyampaikan rasa penyesalan atas jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak. Dalam suatu wawancara di satu stasiun TV di Jakarta Ben Bot menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan secara yuridis telah diberikan pada akhir tahun 1949, dan pengakuan hanya dapat diberikan satu kali.

Pada 15 Agustus 2005 di Den Haag sebelum berangkat ke Jakarta, dalam acara peringatan hari pembebasan para interniran Belanda dari kamp-kamp interniran Jepang di Indonesia, dia menyatakan bahwa kini pemerintah Belanda menerima *de facto* proklamasi 17.8.1945.

Pernyataan ini seharusnya sangat mengejutkan, karena berarti sampai tanggal 16.8.2005, bagi pemerintah Belanda, Republik Indonesia tidak eksis samasekali dan baru pada 16.8.2005 diterima eksistensinya, namun tetap tidak diakui secara yuridis. Ini juga berarti Republik Indonesia disamakan dengan ANAK HARAM, yang hanya diterima keberadaannya, namun tidak diakui legalitasnya.

Memang bagi pemerintah Belanda sangat dilematis, sebab apabila pemerintah Belanda mengakui *de jure* kemerdekaan RI adalah 17.8.1945, maka akan membawa konsekuensi yang sangat berat bagi Belanda, yaitu:

1. Dengan demikian pemerintah Belanda mengakui, yang mereka namakan “aksi polisional I dan II” yang dilancarkan pada 21 Juli 1947

dan 19 Desember 1948, tidak lain adalah agresi militer terhadap suatu negara yang merdeka dan berdaulat,

2. Pemerintah Indonesia berhak menuntut pampasan perang dari Belanda, seperti yang dilakukan oleh negara-negara korban agresi militer Jepang terhadap Jepang,

3. Para veteran Belanda menjadi penjahat perang.

Alasan Belanda melancarkan “aksi polisional” adalah untuk memulihkan kembali “*law and order*” di dalam negeri, serta membasmi para perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai Jepang. Oleh karena itu, apabila bangsa Indonesia tetap membiarkan sikap Belanda ini, maka bangsa Indonesia membiarkan pandangan, bahwa para pejuang Indonesia yang terbaring di berbagai TM Pahlawan di seluruh Indonesia adalah perampok, perusuh, pengacau keamanan dan ekstremis yang dipersenjatai Jepang.

Belanda Kehilangan Hak Sejarah Atas Jajahannya

Perang Dunia kedua dimulai di Eropa dengan penyerangan Jerman terhadap Polandia pada 3 September 1939. Pada 10 Mei 1940 Belanda diserang oleh tentara Jerman, dan hanya dalam waktu tiga hari Belanda dikuasai oleh Jerman. Pemerintah dan Ratu Belanda melarikan diri ke Inggris dan membentuk pemerintahan eksil (*exile government*) di London. Dengan demikian, pemerintah Belanda sudah tidak ada lagi.

Di Asia Timur, agresi militer Jepang dimulai dengan melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Di Asia Tenggara, Jepang melancarkan agresinya dengan menyerang negara-negara di Asia tenggara, yang waktu itu –kecuali Thailand- berada di bawah penjajahan negara-negara Eropa. Satu persatu negara-negara jajahan Eropa jatuh ke tangan Jepang. Setelah menghancurkan pertahanan laut Sekutu, pada 1 Maret 1942 Jepang mendaratkan tentaranya di Pulau Jawa. Pendaratan dilakukan serentak di tiga

titik, yaitu di Banten (Jawa Barat), Eretan Wetan dan Kranggan (Jawa Tengah). Hanya dalam waktu satu minggu, tentara sekutu disapu bersih oleh balatentara *Dai Nippon*.

Pada 9 Maret 1942 di Kalijati, Letjen Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi tentara Belanda di India-Belanda, mewakili Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer menandatangani dokumen menyerah tanpa syarat (*unconditional surrender*). Belanda menyerahkan seluruh wilayah jajahannya kepada Jepang. Dengan demikian, tanggal 9 Maret 1942 juga merupakan tanggal resmi berakhirnya penjajahan Belanda di bumi Nusantara. Sejak tanggal tersebut, Belanda telah kehilangan haknya atas wilayah Hindia-Belanda.

Mengenai hilangnya “hak sejarah” Belanda atas Republik Indonesia, diterangkan oleh Lambertus Nicodemus Palar, Ketua delegasi RI di PBB, dalam Memorandum yang disampaikan di sidang Dewan Keamanan (DK) pada 20 Januari 1949. Memorandum yang sangat mengagumkan tersebut berbunyi antara lain sebagai berikut:

“...*Bahwasanya menurut sejarahnya RI bukanlah terlahir sebagai hasil suatu pemberontakan terhadap Belanda, melainkan lahir sesudah Belanda bulat-bulat menyerahkan Indonesia kepada Jepang, dengan tidak sedikit juga pun ada bayangannya untuk mencoba mempertahankannya...*

...*Demikianlah maka Belanda bukan saja telah menyerahkan Indonesia kepada imperialis Jepang tanpa melakukan usaha yang benar-benar dapat mempertahankannya, tetapi juga menolak memberikan kepada rakyat Indonesia sendiri kekuatan untuk melawan Jepang...*

...*Dari segala segi, “hak sejarah” yang didasarkan atas kekuasaan dan penindasan tidaklah sesuai lagi dalam suatu dunia yang mengagung-agungkan kemerdekaan. Persetujuan yang sah yang tidak mengandung keadilan dan yang terlepas dari kenyataan sejarah yang baru berlalu, tidaklah bisa disebutkan sesuai dengan kewajaran jalannya sejarah...*

...*Republik sudah berdiri 3 tahun*

Republik sampai sekarang sudah berdiri tiga tahun lebih dan karena itu tidaklah gampang menghapuskannya,

seperti diinginkan Belanda.

Selama tiga tahun itu Republik telah mengadakan hubungan diplomatik dengan beberapa negara dan dengan Dewan Keamanan serta telah mendapat sahabat di antara negara-negara itu.

Republik telah memerintahkan daerahnya dan telah beroleh sifat-sifat dan mempunyai syarat-syarat seperti yang dimiliki setiap negara merdeka dan berdaulat: bendera kebangsaan, tentara dan polisi kebangsaan, keuangan, perpajakan dan hubungan luar negeri sendiri...”

Demikian a.l. isi Memorandum delegasi RI dalam sidang DK PBB.

Jepang Menyerah, Terjadi *Vacuum Of Power*

Setelah berhasil mengalahkan tentara sekutu di Pulau Jawa, tentara Jepang telah menguasai seluruh negara-negara di Asia Tenggara, yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara Eropa.

Selama perang masih berkecamuk di Eropa dan Afrika, kekuatan tentara sekutu terpecah, sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh untuk menghadapi Jepang di Asia. Namun setelah Jerman ditundukkan pada bulan Mei 1945, sekutu dapat mengalihkan kekuatannya ke Asia untuk mengalahkan Jepang. Pada 15 Agustus 1945 Kaisar Jepang Hirohito menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.

Penandatanganan dokumen menyerah tanpa syarat kepada sekutu ditandatangani oleh Jepang pada 2 September 1945 di atas kapal perang AS Missouri, di Teluk Tokyo. Ini berarti, antara tanggal 15 Agustus sampai 2 September 1945, terdapat *vacuum of power* (kekosongan kekuasaan) di Negara-negara yang diduduki oleh Jepang, termasuk Indonesia.

Landasan Hukum Internasional

Pada 17 Agustus 1945, di masa *vacuum of power* tersebut, para pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada 18 Agustus mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan M. Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada 5 September 1945, dibentuk Kabinet RI pertama. Dengan demikian, tiga syarat pembentukan suatu

Negara telah terpenuhi sesuai dengan Konvensi Montevideo, yaitu a. Adanya penduduk yang permanent, b. Adanya wilayah tertentu c. adanya pemerintahan, dan d. Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional.

Dalam Konvensi Montevideo yang ditandatangani oleh 20 negara-negara seluruh Amerika pada 26 Desember 1933, disebutkan a.l.:

ARTICLE 1

The state as a person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.

Ayat tiga konvensi ini menyebutkan, bahwa keabsahan tersebut tidak tergantung dari pengakuan negara lain. Bahkan sebelum pengakuan dari negara lain, negara tersebut berhak mempertahankan integritas dan kemerdekaannya.

Tahun 1946, Liga Arab memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 10 Juni 1947 Mesir menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia, kemudian disusul oleh India setelah merdeka dari Inggris. Dengan demikian ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947, keempat syarat konvensi Montevideo telah terpenuhi.

Landasan Moral dan Politis

Political will untuk memerdekakan negara-negara yang dijajah oleh negara lain telah tercetus sejak awal abad 20. Secara resmi, hal ini dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, dalam 14 butir konsep perdamaian yang disampaikannya di muka Kongres AS pada 8 Januari 1918, 10 bulan sebelum berakhirnya perang dunia pertama. Dalam butir lima konsepnya, Wilson menyebut:

“ A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the population concerned must have equal weight with the equitable claims

of the government whose title is to be determined.”

Pada waktu itu, Franklin D. Roosevelt menjabat sebagai Asisten Menteri Angkatan Laut di kabinet Wilson. Pada 4 Maret 1933, Roosevelt terpilih untuk pertama kali sebagai presiden Amerika Serikat. Dia menjabat sebagai presiden hingga meninggal pada 12 April 1945.

Pada 14 Agustus 1941, Franklin D. Roosevelt sebagai Presiden AS dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengeluarkan seruan yang dikenal sebagai Piagam Atlantik (Atlantic Charter), di mana butir tiga menyebutkan:

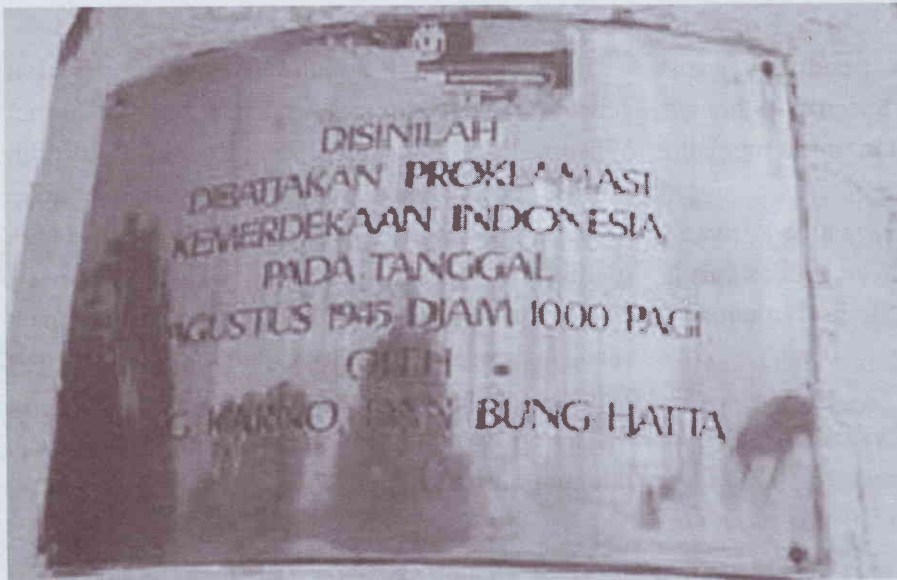
“ ...Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self government restored to those who have been forcibly deprived of them ...”

Butir tiga ini dikenal sebagai “ ...right for selfdetermination of peoples ...” (Hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri).

Atlantic Charter ini menjadi dasar dari *United nations Charter* (Piagam PBB), yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945. Pasal satu ayat dua piagam PBB ini menguatkan butir ketiga dari *Atlantic Charter*. Bunyinya:

“... To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace...”

Dengan demikian jelas adanya, bahwa dipandang dari berbagai segi, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah sah, baik dari segi hukum internasional, maupun dari segi politis, moral dan HAM. Yang dinyatakan oleh pemerintah Belanda sebagai “aksi polisional 1 (21 Juli 1947, yang merupakan pelanggaran terhadap persetujuan Linggajati) dan 2 (19 Desember 1948, yang merupakan pelanggaran terhadap persetujuan Renville)”, jelas adalah agresi militer terhadap suatu Negara merdeka dan berdaulat. Dalam sambutannya di Jakarta pada 16 Agustus 2005, Ben Bot mengakui bahwa:



Diunduh dari : (korananakindonesia.wordpress.com)

“...In retrospect, it is clear that its large-scale deployment of military forces in 1947 put the Netherlands on the wrong side of history. The fact that military action was taken and that many people on both sides lost their lives or were wounded is a harsh and bitter reality ...”

Ben Bot di sini menyebutkan **“military forces”**, dan bukan **“police forces.”** Dia mengatakan bahwa aksi tersebut adalah pengerahan militer secara besar-besaran (*large scale deployment of military forces*) dan bukan polisi.

Hubungan “Diplomatik” Republik Indonesia – Belanda

Apabila dua Negara akan menjalin hubungan diplomatik, sudah seharusnya keduanya saling mengakui secara yuridis. Apabila Negara yang satu tidak mengakui *de jure* kemerdekaan Negara yang akan menjadi mitra diplomatiknya, tentu akan menjadi suatu hubungan yang sangat aneh. Demikianlah yang terjadi antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda, di mana Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui *de jure* kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945, dan tetap bertahan pada versi Belanda, yaitu *de jure* kemerdekaan RI adalah 27 Desember 1949.

Hal ini sangat diketahui oleh para pejabat

tinggi di Kementerian Luar Negri RI, terutama oleh para Duta Besar Republik Indonesia yang pernah bertugas di Belanda. Yang sangat mengherankan di sini adalah, pemerintah Indonesia, yang mengetahui hal ini dengan jelas, tidak mempermasalahkan sikap Belanda ini.

Memang adalah hak Pemerintah Belanda untuk mengakui atau tidak *de jure* proklamasi kemerdekaan RI, namun di lain pihak, apabila Pemerintah Indonesia

mengetahui hal ini, maka ini seharusnya berlaku timbal-balik, yaitu Pemerintah Republik Indonesia juga menyatakan, tidak mengakui Pemerintah Belanda dan memutuskan hubungan diplomatik!

Menurut KNPMBI, masalah pengakuan *de jure* adalah masalah martabat sebagai bangsa yang merdeka. KNPMBI mempermasalahkan hubungan diplomasi RI-Belanda yang sangat aneh, dan sebenarnya sangat melecehkan martabat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, KNPMBI mendesak semua pihak yang berwenang, untuk meninjau kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Belanda.

Dengan beberapa Negara, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, seperti dengan Taiwan dan Israel. Namun tidak ada masalah atau kesulitan dalam hubungan perdagangan, investasi, pariwisata dll. Bahkan dengan Israel, Negara yang sangat ditentang eksistensinya oleh banyak kalangan di Indonesia, pada tahun 1980 Pemerintah RI membeli 36 pesawat tempur jenis Sky Hawk dari Israel!

Apakah ada kerugian bangsa dan Negara Indonesia apabila tidak ada hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda?

PERTEMPURAN BOJONGKOKOSAN

OLEH NONO SUKARNO

Jalur jalan raya antara Bogor-Sukabumi-Cianjur pada akhir tahun 1945 pernah menjadi saksi sejarah bagi perjuangan anak bangsa melawan Sekutu. Di Daerah Bojongkokosan di sepanjang 81 kilometer jalan raya Cigombong Bogor-Sukabumi sampai Ciranjang-Cianjur, pernah terjadi pertempuran sengit yang kemudian terkenal dengan nama "Pertempuran Bojongkokosan" pada tanggal 9 – 12 Desember 1945. Meski korban di pihak pejuang mencapai 40 orang, tetapi pada akhirnya pertempuran ini berhasil dimenangkan

P erang Asia Timur Raya berakhir setelah Kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang diluluhlantakan oleh bom atom Amerika Serikat. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Peluang yang baik ini dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata usaha Indonesia memproklamkan kemerdekaan tidak digubris pihak Belanda yang sebelum Jepang juga sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ambisi Belanda untuk menguasai kembali wilayah jajahannya dengan membongceng pihak Sekutu akhirnya memicu terjadinya berbagai pertempuran di wilayah Indonesia.

Keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia ini mempersulit pelaksanaan misi Internasional yang diemban pihak Sekutu, khususnya Inggris yang tergabung dalam SEAC (South East Asia Command) dan bertugas melucuti dan memulangkan lebih kurang 35.000 tentara Jepang di seluruh Indonesia, serta mengirim perbekalan dan memulangkan Allied Prisoner of Wars and Internees (APWI) yang mencapai jumlah 36.000 orang.

Untuk menangani wilayah bekas jajahan Belanda dibentuklah AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies). Kedatangan Panglima AFNEI Letnan Jenderal Sir Philip Christison dengan pasukannya yaitu Divisi ke 23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hawthorn, dan Divisi ke 26 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Chambers, ternyata secara diam-diam diikuti pasukan KL (Koninklijke Landmacht/Tentara Darat Kerajaan Belanda) dan KNIL (Koninklijke Netherlands Indische Leger/Tentara Kolonial Hindia Belanda). Hal ini mengakibatkan

disana sini terjadi pertempuran yang membuat sulitnya pelaksanaan tugas tersebut.

Melihat kenyataan ini, Pemerintah Indonesia mencoba menawarkan jasa baik untuk membantu terlaksananya misi Internasional tersebut, namun tidak mendapatkan respon karena mereka menganggap Indonesia tidak akan mampu melakukannya. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang bermarkas di Yogyakarta dan merupakan kelanjutan dari BKR (Badan Keamanan Rakyat).

Seringkali misi Internasional Sekutu ini dilakukan tanpa memberitahu pihak Indonesia, seperti yang terjadi pada tanggal 21 November 1945, di mana pihak Sekutu mengirimkan perbekalan untuk APWI di Bandung dengan menggunakan Kereta Api lintas Cikampek. Akibatnya Kereta Api di hadang oleh pasukan TKR dan semua perbekalannya disita. Pada penghadangan ini jatuh korban dipihak Sekutu sebagai pengawal Kereta Api, yaitu para serdadu Gurkha dari India.

Menyadari banyaknya korban yang jatuh dan situasi yang tidak mendukung ini, akhirnya tercapai perundingan antara Sekutu dengan pihak TKR. Disepakati bahwa RI akan membantu Sekutu dalam melaksanakan tugas Internasional tersebut, sedangkan pihak Sekutu akan membantu fasilitas yang diperlukan. Pada tanggal 11 Desember 1945 dilaksanakanlah pengawalan Kereta Api yang membawa perbekalan untuk APWI dari Jakarta ke Bandung di kawal oleh TKR yang dalam hal ini di bebaskan kepada para Taruna Akademi Militer Tangerang. Selama kurang lebih satu bulan telah dilakukan sebanyak tiga kali pengiriman dengan

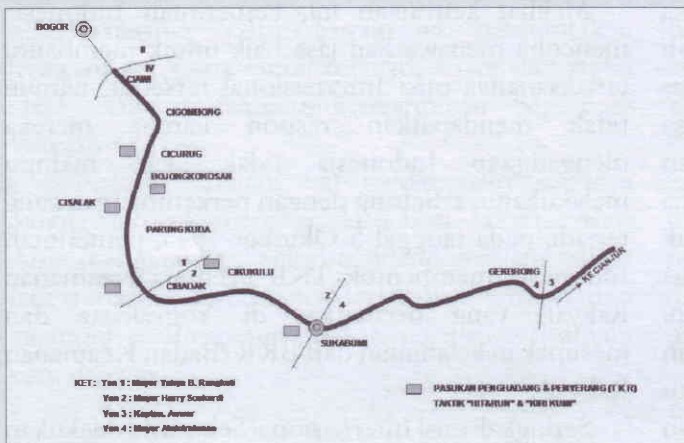
pengawalan para Taruna Akademi semuanya berjalan mulus tanpa hambatan.

Pertempuran Bojongkokosan

KESEPAKATAN antara TKR dan pihak Sekutu tidak berjalan lama. Sikap merasa mampu melakukan pengamanan sendiri, membuat pihak Sekutu kembali melakukan misinya tanpa sepengetahuan pihak Indonesia. Rupanya penghadangan pengiriman perbekalan APWI dari Jakarta-Bandung melalui jalur Kereta Api Cikampek oleh TKR yang pernah terjadi tidak menjadi pelajaran bagi pihak Sekutu. Mereka mungkin berfikir bahwa untuk pengiriman dengan

dipercayakan kepada Resimen III TKR Sukabumi di bawah pimpinan Letkol Eddie Soekardi yang segera melakukan her dislokasi keempat batalionnya.

Batalyon 1 yang terdiri dari 4 kompi, dipimpin Mayor Yahya B. Rangkuti dengan pasukannya di Cibadak, mengambil posisi disepanjang jalan raya Ciawi-Cigombong sepanjang 18 km, bertugas sebagai pemukul pertama. Pusat kekuatannya ditempatkan ditebing-tebing kanan-kiri tikungan di jalan raya Bojongkokosan. Sesuai arahan pimpinan, sasaran pertama adalah kendaraan terdepan atau pelindung yaitu tank dan panser wagon, kendaraan PHB, para pengemudi konvoi, dan berikutnya baru truk-truk pengangkut perbekalan. Mereka harus melakukan taktik "Hit and Run". Apabila musuh lolos dari hadangan pertama, mereka akan masuk ke wilayah Batalion 2, 4 untuk menghadapi hadangan berikutnya. Batalion 2 sebagai pemukul kedua yang juga memiliki 4 kompi dibawah pimpinan Mayor Harry Soekardi, bersiaga mulai dari Cibadak sampai Sukabumi Barat, juga sepanjang 18 km. Batalion 4 dipimpin Mayor Abdurachman ditempatkan di jalan raya Sukabumi bagian timur hingga Gekbrong, sepanjang 15 km, sedangkan Batalion 3 dibawah Kapten Anwar bersiaga mulai dari Gekbrong hingga Ciranjang-Cianjur, sepanjang 30 km. Kekuatan seluruhnya lebih kurang 3000 orang dibantu laskar perjuangan dan rakyat. Kebanyakan anak



Gambar 1
(Herdislokasi Batalion 1,2 dan 4 Resimen III TKR
Sukabumi Desember 1945)

Kereta Api memang harus disertai pengawalan dari pihak Indonesia, namun bila hal itu dilakukan melalui darat, pengawalan tersebut tidak diperlukan lagi karena merasa memiliki kemampuan untuk melakukan pengamanan sendiri.

Dari pemikiran ini, pihak Sekutu merencanakan kembali untuk mengirimkan perbekalan APWI melalui jalan darat dengan menempuh rute Jakarta-Bogor - Sukabumi - Cianjur - Bandung. Lagi-lagi rencana ini tanpa di konsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Indonesia dan bahkan langsung dilaksanakan. Namun pihak kita mengetahui adanya rencana ini, maka Pemerintah segera melakukan koordinasi dengan komandan TKR Jawa Barat, dan Walikota Sukabumi untuk mempersiapkan diri guna melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap konvoi Sekutu yang melintas di daerah TKR. Tugas penghadangan ini secara operasional

buah Letkol Eddie Soekardi adalah anak-anak muda berumur antara 19-29 tahun yang penuh semangat perjuangan. Mereka tersebar diseluruh wilayah Kotamadya Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, bertugas untuk menghadang dan menyerang tentara Sekutu. Untuk itu mereka bersiap siaga menunggu kedatangan konvoi Sekutu yang diperkirakan datang dari arah Jakarta.

Dari kesiapan pasukan ini, menunjukkan bahwa tentara kita berani dan sanggup melawan tentara pemenang Perang Dunia II, walaupun dalam kondisi darurat dan serba terbatas, seperti misalnya tidak ada fasilitas tersedia karena memang tidak ada anggaran, tidak ada gaji dan lain-lain, tetapi hal itu tidak pernah menyurutkan perjuangan mereka. Dengan semangat yang tinggi, serta senjata seadanya, siap tidak siap mereka ikut terpanggil untuk berperang melawan Sekutu, tanpa rasa

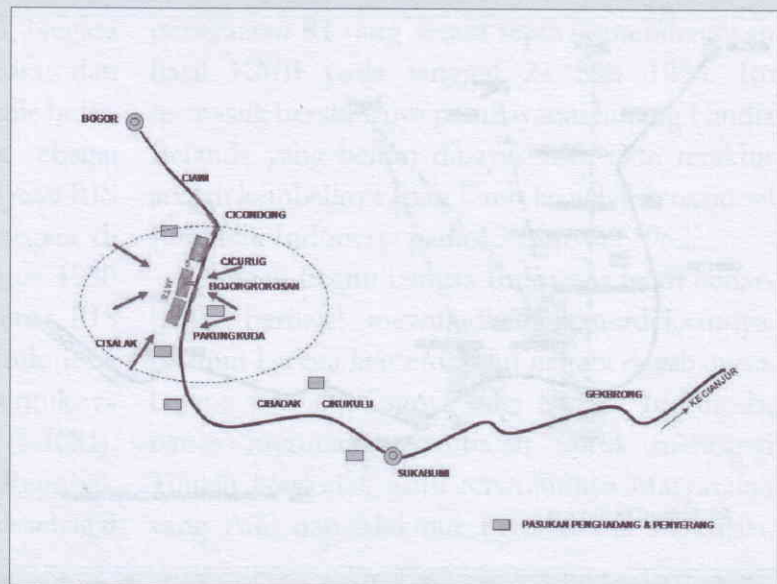
takut sedikitpun menghadapi lawan yang dilengkapi dengan mesin perang modern.

Persiapan Resimen III TKR untuk menghadang konvoi Sekutu berjalan sesuai rencana, untuk persiapan pertempuran mereka menggunakan senjata seadanya yang dapat mereka gunakan. Mengingat terbatasnya persenjataan dan amunisi, Komandan Resimen memesan kepada anak buahnya untuk melakukan taktik "Hit and Run"

Pada tanggal 9 Desember 1945 sore hari, datanglah yang ditunggu-tunggu yaitu konvoi perbekalan APWI yang terdiri dari 150 buah truck, dengan dikawal 2 buah Tank Sherman, Panser Wagon, serta batalyon 5/9 Jats dari Divisi ke-23 India. (Satuan Tentara Inggris berasal dari Punjab India, yang merupakan tentara andalan dan berpengalaman dalam Perang Asia Timur Raya, sekaligus sebagai pemenang Perang Dunia II). Konvoi kendaraan sekutu sebanyak itu berderet sepanjang 12 kilometer.

Pada saat konvoi bergerak memasuki Cicurug di daerah Bojongkokosan, dan berada diantara dua tebing jalan raya, secara mendadak mendapat serangan pertama dari pihak pasukan TKR yang sudah menghadang. Setelah Tank Sherman yang berada di posisi terdepan terkena ranjau dan mengakibatkan putusnya rantai tank, maka pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan. Korban di kedua belah pihak berjatuhan, termasuk dua belas orang dari pihak penghadang yang tewas sekaligus terkena hantaman meriam tank Sherman yang menghancurkan tempat persembunyiannya. Konvoi yang dengan kondisi terpenggal-penggal menjadi beberapa bagian berusaha melanjutkan gerak majunya setelah pihak penghadang mengundurkan diri.

Penghadangan serupa terjadi pula di beberapa tempat lainnya sepanjang jalan raya menuju Sukabumi, tepat di daerah Parung Kuda-Cibadak-Cikukulu. Serangan gencar membuat semakin paniknya tentara pengawal Jats. Timbul pula korban nyawa maupun perbekalan dari pihak Sekutu. Konvoi pun kembali berjalan setelah dengan tiba-



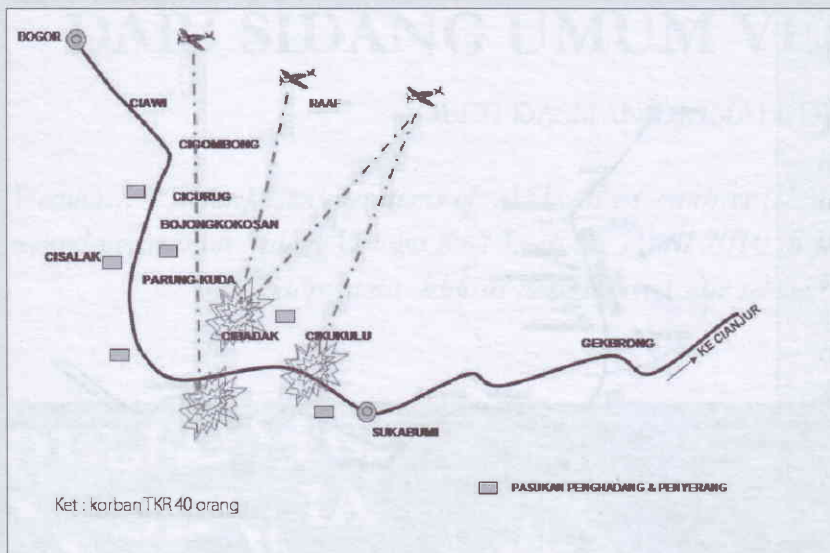
Gambar 2.
Pertempuran Bojongkokosan tanggal 9 Desember 1945
(Penghadangan Konvoi Sekutu oleh TKR)

tiba pula serangan berhenti karena pihak penyerang langsung menghilang. Rupanya mereka memegang teguh perintah pimpinannya untuk melakukan taktik "Hit and Run"

Dengan susah payah, akhirnya konvoi Sekutu yang terpenggal-penggal itupun sampai di Sukabumi dengan korban yang tidak sedikit di pihaknya. Sementara itu kompi pengawalnya yang berada dibelakang masih ada yang menghadapi pertempuran hingga pukul 02.00 dini hari.

Menjelang subuh, akhirnya konvoi yang tercecer tiba di Sukabumi. Pengalaman menghadapi serangan dari TKR dan rakyat di sepanjang jalan raya Cicurug-Sukabumi yang begitu menggetarkan dan tidak diperkirakan sebelumnya membuat pimpinan pasukan melaporkan ke Markas Besar Sekutu di Jakarta bahwa mereka tidak sanggup melanjutkan gerakan konvoi ke Bandung.

Hari berikutnya tanggal 10 Desember 1945, Sekutu melakukan serangan udara di daerah Cibadak. Beberapa pesawat RAF (Royal Air Force) menjatuhkan bom-bom udara dengan hebatnya. Mungkin mereka mengira daerah tersebut adalah basis pertahanan utama TKR. Mengingat di antara lokasi antara Bojongkokosan - Cikukulu itulah konvoi Sekutu mendapat serangan gencar sehari sebelumnya. Serangan udara ini baru selesai pada pukul 16.00 sore hari. Korban rakyat akibat serangan udara ini tidak banyak karena mereka



Gambar 3.

Serangan udara RAF atas Cibadak pada tanggal 10 Desember 1945
 ("Serangan udara terdahsyat dalam perang di P.Jawa". Doulton, 1951 The Fighting Cock)

sempat diungsikan sebelumnya. Serangan balasan ini rupanya sudah diantisipasi oleh pihak TKR.

Pemboman udara yang dilakukan Sekutu ini tidak membuat nyali pasukan Sekutu yang sudah berada di Sukabumi menjadi timbul kembali. Tetap saja mereka tidak berani melanjutkan perjalanan ke Bandung, karena tahu bahwa disepanjang jalan dari Sukabumi - Cianjur - Bandung sudah siap pasukan TKR yang akan menghadangnya. Mereka menyadari bahwa ternyata serangan udara RAF tetap tidak menjamin keamanan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan ke Bandung.

Disisi lain, pihak Markas Besar Sekutu juga tidak habis pikir mengapa pasukan andalannya tersebut tetap tidak berani meneruskan gerakannya ke Bandung. Bahkan setelah dilakukan bombardier udara yang diharapkan dapat menetralkan kekuatan TKR, ternyata tidak mencapai tujuannya. Namun, akhirnya Markas Besar Sekutu memutuskan untuk mengirimkan bantuan berupa Batalyon 3/3 Gurkha Rifles dari Cimahi, Bandung menuju Sukabumi.

Sementara itu dikirim pula seorang juru runding dari Bogor bernama Ravin Singh, seorang perwira India berpangkat Mayor untuk menemui Pimpinan Pemerintah Daerah di Sukabumi dan Pimpinan TKR setempat yaitu Letkol Eddie Soekardi dalam rangka meminta jaminan keselamatan bagi konvoinya pada saat menuju ke Bandung.

Tanggal 11 Desember 1945, tanpa pemberitahuan kepada pihak TKR, dari Markas Sekutu TKR Cimahi,

Bandung di berangkatkan konvoi yang bertugas sebagai penolong yaitu Batalyon 3/3 Gurkha Rifles. Konvoi ini pun dikawal beberapa Tank Sherman, Panser Wagon dan Brencarrier serta truk-truk pengangkut pasukan. Serangan pertama dari pihak TKR terhadap tentara Sekutu ini terjadi di daerah Cisokan. Serangan mendadak diikuti pengunduran atau "Hit and Run" ini sangat mengejutkan sekaligus mendatangkan korban dipihak musuh.

Pada saat konvoi melanjutkan gerakannya serangan oleh TKR di lakukan lagi didaerah Cikijing. Sama, di tempat inipun pasukan Gurkha menjadi korban bulanan TKR, banyak korban dipihak Sekutu. Perjalanan pun di lanjutkan kembali setelah pasukan penyerang dengan tiba-tiba menghilang. Kondisi yang sedemikian ini membuat setiap tentara pengawal menjadi takut dan cemas menghadapi apa yang akan terjadi didepannya sebelum sampai di Sukabumi.

Di lokasi Belendung dan Sabandar terjadi pula penghadangan oleh TKR. Disini pun korban di pihak Sekutu bertambah, sedangkan tidak satupun di pihak TKR. Konvoi melanjutkan perjalanan menuju Cianjur setelah para penyerang kembali menghilang. Taktik "Hit and Run" rupanya cukup mengganggu lawan, bahkan berhasil menimbulkan korban yang tidak sedikit.

Memasuki kota Cianjur bukan berarti keadaan sudah aman bagi konvoi tentara Gurkha tersebut. Kembali mereka di hadang dan diserang oleh barisan Banteng Suroso serta barisan Hisbullah dan Sabilillah yang melakukannya dari sudut-sudut pertokoan dan lorong-lorong perkotaan. Melewati kota Cianjur, konvoi ini masih menghadapi serangan lainnya yaitu di tikungan Leuwi Goong dan di Warung Kondang.

Serangan mendadak yang menimbulkan korban tewas dipihak Sekutu ini pun segera diikuti dengan pengunduran segera oleh pihak TKR. Kemudian konvoi pun melanjutkan perjalanannya. Rintangan berikutnya berupa barikade-barikade yang

menutupi jalan yang akan dilalui konvoi di jalan raya Gekbrong. Serangan gencar TKR dari kanan kiri jalan raya besar membuat panik dan kacau balau pasukan Gurkha Rifles ini. Disini pun timbul korban dipihak Sekutu dan segera pula pihak penyerang langsung kembali menghilang.

Senja hari barulah pasukan Gurkha ini dengan susah payah dan babak belur berhasil memasuki kota Sukabumi dan bergabung dengan konvoi Batalion Jats yang akan ditolongnya dan masih tertahan di tengah kota.

Malam itu juga kedua konvoi Sekutu segera diberangkatkan menuju Bandung setelah sebelumnya memohon kepada pihak TKR untuk tidak dihadang dan diserang lagi. Atas instruksi Komandan Resmen TKR Sukabumi kepada batalion 3 dan 4 maka kedua konvoi dapat bergerak sampai di Bandung dengan selamat tanpa gangguan dari pihak TKR.

Demikianlah pertempuran Bojongkokosan disepanjang 81 kilometer jalan raya Cigombong Bogor-Sukabumi sampai Ciranjang-Cianjur, yang telah menimbulkan korban sebanyak 40 orang dari pihak pejuang dan rakyat.

Sebagai dampak dari peristiwa Bojongkokosan ini, pemerintah Inggris mendapat kecaman dari pihak keluarga korban tentara yang tewas dalam pertempuran, sekaligus juga dari pers internasional yang menyoroti peran Inggris dalam AFNEI di Indonesia. Hal ini sempat menghebohkan Parlemen Inggris karena serangan armada tempur udara RAF tanggal 10 Desember 1945 di Cibadak hanya menghambur-hamburkan anggaran dan salah sasaran. Demikian juga dari luar negeri diterima protes khususnya dari India (Presiden Nehru), karena Inggris telah menggunakan tentara sewaan dari India untuk melakukan tugas internasional tersebut. Sebenarnya, Panglima, AFNEI Letnan Jenderal Sir Philip Christison sudah mengingatkan stafnya bahwa Republik Indonesia sulit dilenyapkan, demikian pula semangat juang rakyat Indonesia tidak mungkin dihapuskan.

Dari gambaran peristiwa Bojongkokosan ini, nampak jelas bahwa pasukan yang dilengkapi persenjataan modern tidak menjadi jaminan bahwa pasti akan mengungguli pasukan yang memiliki persenjataan sederhana, masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penentu akhir, seperti semangat,

motivasi, kerelaan berkorban, dan lain-lain.

Faktor-Faktor inilah yang menjadi keunggulan pihak TKR dibandingkan dengan tentara Sekutu, terbukti dari persenjataan modern yang dimiliki tentara Sekutu, ditambah serangan udara RAF yang begitu hebat kepada pasukan TKR (bahkan disebutkan serangan udara yang dilakukan atas Cibadak adalah yang terbesar di Jawa), tidak dapat meruntuhkan moril dan motivasi tentara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Demikian pula keunggulan atas lawan di satu tempat, juga bukan jaminan bahwa pasti akan mengalami hal yang sama pada saat bertempur melawan pasukan ditempat lainnya, terbukti disini Inggris sebagai salah satu negara Sekutu yang mengalami kemenangan pada saat Perang Dunia ke II tidak serta merta memperoleh kemenangan pada saat melawan Tentara Keamanan Rakyat Indonesia dengan persenjataan yang sederhana dan terbatas.

Menganggap enteng lawan bisa menjadi "senjata makan tuan", seperti ditunjukkan pada pertempuran Bojongkokosan ini. Sekutu yang begitu meremehkan TKR dalam membantu melaksanakan misi Internasional, menyepelkan kesediaan dan kemampuan untuk membantu dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas tersebut. Akibatnya mereka mengalami kerugian yang tidak kecil pada saat melaksanakan tugas tersebut tanpa mau bekerja sama dengan pihak TKR.

Peristiwa Bojongkokosan ini membawa Inggris kepada citra yang kurang menguntungkan baik di mata Internasional maupun didalam negaranya sendiri, yaitu sebagai salah satu negara Sekutu ternyata tidak mampu melaksanakan misi Internasional dengan baik. Disisi lain, dari dalam negaranya sendiri pertempuran Bojongkokosan justru berdampak pada pengeluaran anggaran yang sia-sia, termasuk para prajurit yang meninggal tanpa kejelasan untuk siapa mereka sebenarnya mengorbankan nyawanya.

Semangat tempur yang tinggi di sertai dengan ketaatan memegang perintah atasan seperti ditunjukkan para prajurit TKR yang tetap taat melaksanakan perintah pimpinannya untuk melakukan dengan disiplin taktik "Hit and Run" telah membawa kepada kesuksesan di medan pertempuran Bojongkokosan ini.

SERANGAN UMUM SOLO

DIRANGKUM OLEH BANTU HARDJIJO



Foto diambil pada tanggal 12 November 1949, Penandatanganan, di Stadion Solo oleh Let.Kol Slamet Riyadi dan Mayjen. Mollinger.

Serangan Umum Solo berlangsung pada tanggal 7- 10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumi hanguskan dan menduduki markas-maskas Belanda di Solo dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah, serangan itu digagas di kawasan Monumen Juang 45, Banjarsari, Solo. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonosido, Kabupaten Sragen dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan.

Mereka yang melakukan serangan bergabung dalam Detasemen II Brigade 17 Surakarta yang dipimpin Mayor Achmadi. Untuk menggempur markas penjajah, serangan dilakukan dari empat penjuru kota Solo. Rayon I dari Polokarto dipimpin Suhendro, Rayon II dipimpin (Sumarto). Sementara itu Rayon III dengan komandan Prakosa, Rayon IV dikomandani A Latif (almarhum), serta Rayon Kota dipimpin Hartono. Menjelang pertengahan pertempuran Slamet Riyadi dengan pasukan Brigade V/Panembahan Senopati turut serta dan menjadi tokoh kunci dalam menentukan jalannya

pertempuran. Serangan ini mengubur untuk selamanya ambisi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.

Gencatan Senjata Indonesia Vs Belanda

Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 22.00 malam, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera. Untuk itu maka sebelum tanggal tersebut pihak Brigade V/Panembahan Senopati pimpinan Letkol Slamet

Riyadi dan Detasemen TP Brigade XVII pimpinan Mayor Achmadi berencana menggunakan kesempatan sebelum gencatan senjata tersebut untuk mendapatkan posisi dan merebut kedudukan musuh di Kota Solo agar pihak Belanda tahu bahwa TNI masih ada taring, nyali dan tetap bertekad bukan saja dengan tujuan tersebut di atas, tapi tetap akan mengusir Belanda. Untuk itu diadakan rencana serangan umum terhadap Kota Solo.

Perlu diketahui juga bahwa seperti TNI di Jogja, pihak TNI di Solo juga mengadakan seran umum sebelumnya agar dapat diketahui perkiraan kekuatan lawan, kedudukan lawan dan data-data di lapangan. Semenjak Jogja diserahkan ke RI bulan Juli 1949, sebagian kekuatan tentara Belanda ditarik Ke Solo, sehingga menambah kekuatan yang ada sebelumnya. Serangan pertama dilakukan pada tanggal 8 Februari 1949 sedang yang kedua dilakukan tanggal 2 Mei 1949.

Peristiwa menjelang Serangan Umum Solo

Sebelum Serangan Umum 4 Hari ada beberapa peristiwa yang mendukung keberhasilan pejuang dalam pertempuran ini, antara lain:

Serangan di Jembatan Cluringan, mendapatkan I Bren dan 2 LE. Tentara Belanda yang selamat dalam peristiwa tersebut akhirnya mengalami gangguan jiwa. Sedang barang-barang pribadi milik serdadu Belanda yang tewas dikembalikan pihak TP Brigade XVII kepada komandan Belanda setelah gencatan senjata.

- Pembelotan satu kompi TBS (Teritoriale Batalyon Surakarta) bentukan Belanda dengan membawa 8 Bren, 30 Sten dan 80 senapan.

- Kedua peristiwa tersebut turut berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri para pejuang untuk mengusir Belanda dari Solo.

Kekuatan Belanda di Solo

Solo merupakan kota yang dinilai penting oleh Belanda dalam melancarkan invasinya ke Indonesia sehingga merupakan kota yang diperkuat oleh tentara Belanda terbaik, bahkan pemimpin Tentara Belanda di Solo Kolonel Van Ohl adalah tentara profesional dengan pengalaman yang cukup tinggi dari PD I sampai jadi tentara Belanda di pengasingan waktu Belanda jatuh ke tangan Jerman, ia seorang komandan yang sangat dihormati oleh anak buahnya dan kolega – koleganya seperti Kolonel Van Langen yang menduduki Yogyakarta.

Sebelum Juli 1949

Ada 5 batalyon termasuk pasukan TBS dan Polisi Federal, pada saat sebelum Juli 1949 posisi tentara tersebar di wilayah Republik yang baru dikuasai sehingga tidak memungkinkan melakukan konsentrasi kekuatan. Apalagi fokus tentara Belanda ada pada Yogyakarta yang dinilai lebih penting daripada Solo, mengingat perannya sebagai Ibukota RI pada waktu itu.

Setelah Juli 1949

Ada tambahan dari wilayah sesuai perjanjian Roem Royen hingga di Solo menumpuk kurang lebih 11 Batalyon. Adapun posisi tentara Belanda pada beradapada

Posisi Tentara Belanda :

Panggung Jebres, Margoyudan, Banjarsari, Villa Gantiwarno, Kompleks Balapan, Beteng, Purbayan, Timur Pasar Legi, Timuran, Suryosuwitan, Ngapeman, Museum Radya Pustaka, Pengadilan

Solo, Asrama Batteng, Kodim lama, Baron, Gereja Gendengan dekat SGM, Sanggrahan, Purwosari, Korem di Karten, Jurug, dan Gading.

Posisi Polisi Belanda/Federal:

Jagalan, Pasar Legi, Sosietet Mangkunegaran, Beskalan, Serengan dan Sanggrahan

Pasukan TBS:

Mangkunegaran, Balapan dan Ngemplak.

Setelah penambahan pasukan Belanda sebagai akibat penarikan mundur dari Yogyakarta, bisa dikatakan bahwa Tentara Belanda yang ada di Solo merupakan yang terkuat dan terbaik di era invasi Belanda ke Indonesia. Dari kuatnya konsentrasi Tentara Belanda di Solo, bisa disimpulkan bahwa Belanda belum menyerah dalam usahanya menaklukkan Indonesia.

Kekuatan TNI/Polisi

MBB Brimob , Komisaris Litotno

MBK Brimob Karesidenan

Kompi Zeni TP atau TGP

Detasemen TP Brigade XVII Mayor r\hn:adi

Brigade V/Panembahan Senopati , Letkol Slamet Riyadi termasuk pasukan TP Sturm Abteilung.

Persenjataan pasukan pejuang pada waktu itu boleh dikatakan kurang lengkap, karena yang membawa senjata otomatis bren gun hanya sekitar 15 orang, sedangkan lainnya senjata otomatis ringan. Yang membuat peristiwa itu sangat berkesan adalah berkiprahnya seorang yang bernama Kapten Prakoso (Mantan Rektor UNS), sebagai Komandan Kompi (Cie) I TP.

Jalannya pertempuran

Pada tanggal 7 agustus 1949 dimulai SU pada pukul 06.00 pagi. Pada hari tersebut pasukan TNI telah menyusup dahulu dan mulai menguasai kampung-kampung dalam kota Solo.

Pada tanggal 8 Agustus 1949 hingga 10 Agustus 1949 seluruh pasukan dari SWK 100 sampai 105 dikerahkan untuk membantu serangan hari pertama dengan sasaran seluruh kota Solo dan diakhiri tanggal 10 Agustus pukul 06.00 pagi sesuai perjanjian cease fire pihak Indonesia dan Belanda. Tambahan pasukan ini semakin memperkuat serangan pasukan SWK 106 yang intinya dari DEN TP Brigade Xvll.

Akibatnya pasukan Belanda semakin terdesak karena pasukan dari Brigade V menyekat kekuatan lawan dan menghambat bantuan lawan di luar kota Solo. Konvoi Belanda dari Semarang bahkan tidak dapat memasuki kota Solo karena dihambat oleh pasukan TNI di Salatiga.

Untuk membantu pasukannya yang terjebak di Solo, Belanda bahkan mulai mengerahkan 2 Bomber (tdk diketahui jenisnya) dan 4 pesawat P-51 ditambah pasukan para yang diterjunkan ke Lanud Panasan (Adisoemarmo sekarang). Tapi bantuan ini gagal mengubah arah pertermpruan dimana Tentara Belanda di Solo makin terkepung dan hampir seluruh bagian kota Solo dikuasai oleh TNI.

Korban di kedua belah Pihak

Dalam pertempuran selama empat hari tersebut, 109 rumah penduduk porak poranda, 205 penduduk meninggal karena aksi teror Belanda, 7 serdadu Belanda tertembak dan 3 orang tertawan sedangkan dipihak TNI 6 orang gugur. Dari minimnya korban yang jatuh dikalangan TNI, menunjukkan meningkatnya kinerja TNI dalam melakukan serangan ofensif dibandingkan ketika melakukan serangan Umum 1 Maret.

Peristiwa setelah Serangan Umum Solo

Pada tanggal 11 Agustus terjadi pelanggaran cease fire oleh pasukan baret hijau yang menewaskan banyak penduduk sipil antara lain: di Sambeng-32 orang tewas, di pasar Nongko-67 tewas, di Serengan-47 orang tewas, di Padmonegaran Gading-21 tewas, di Pasar Kembang-24 orang tewas.

Akibatnya terjadi pertempuran lagi akibat peristiwa tersebut diatas. Pada siang hari tanggal 11 Agustus 1949, pihak Belanda yang diwakili Kol van Ohl mengajak berunding dengan Letkol Slamet Riyadi agar semua pasukan TNI ditarik hingga batas kota dan barikade dibersihkan. Pihak Letkol Slamet Riyadi menerima syarat ini karena ada jaminan dari Van Ohl bahwa ada janji:

- Teror belanda tidak terulang lagi
- Tidak akan diadakan pembunuhan terhadap sipil yang membantu TNI

Sebenarnya pasukan TNI terutama pihak DEN TP Brigade XVII tidak mau menerima usul ini

karena hampir seluruh Kota Solo telah berhasil diduduki dalam serangan umum tersebut, karena pihak Belanda telah jelas-jelas melanggar pada tanggal 11 agustus 1949.

Sempat terjadi perbedaan pendapat antara Brigade V dengan Den II TP Brigade XVII. Mayor Ahmadi berpegang teguh pada perintah Panglima Divisi II Kol Gatot Subroto. Mayor Ahmadi menginstruksikan agar pasukan TP tetap dalam sektor masing-masing dengan posisi terakhir dan tidak bertanggung jawab terhadap penarikan pasukan ke batas kota dan memerintahkan apabila Belanda melanggar lagi agar ditindak oleh masing-masing sektor. Sedang pihak Brigade V berpegang teguh pada : Berlakunya cease fire tanggal 3-10 agustus 1949, berpatokan yang minat berunding adalah Belanda yang dalam posisi terdesak, Mengurangi kekejaman pasukan Belanda terhadap sipil.

Permasalahan ini sampai ke Kepala Staf Divisi, Letkol Suprpto (pahlawan Revolusi). Letkol Suprpto tidak dapat memberikan keputusan, akhirnya Panglima Divisi Ii, Kolonel Gatot Subroto memutuskan agar Mayor Ahmadi mengalah dan mematuhi perintah Letkol Slamet Riyadi selaku Dan Brigade V/PS. Pada tanggal 24 Agustus 1949 urusan keamanan kota diserahkan kepada Mayor Ahmadi selaku Komandan Komando Militer Kota (KMK) Solo.

Pengaruh Serangan Umum Solo

Serangan Umum Tentara Pelajar Solo (DETASEMEN-II / BRIGADE-17 TNI), 8 Februari 1949, 2 Mei 1949 dan 7 - 10 Agustus 1949 yang kala itu terbukti berhasil memperkuat posisi tawar politik perjuangan diplomasi delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag, sehingga berujung dicapainya Kedaulatan Republik Indonesia 27 Desember 1949 dapat berdampingan dengan Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena Belanda sadar bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang handal seperti Slamet Riyadi.

MENJADIKAN PANCASILA KENYATAAN DI BUMI INDONESIA

OLEH SAYIDIMAN SURYOHADIPROJO

Adalah penting sekali bahwa Pancasila menjadi kenyataan di Bumi Indonesia, bukan terus saja hanya menjadi semboyan atau slogan belaka. Untuk mencapai itu di masa sekarang bukan hal yang mudah karena besarnya perbedaan antara kondisi Negara sekarang dengan yang dikehendaki Pancasila.

Ada golongan-golongan yang amat berkepentingan kondisi Negara sekarang tidak berubah. Mereka telah menikmati banyak keuntungan dalam kondisi sekarang dan pasti akan mempertahankannya. Mereka tidak banyak peduli bahwa Rakyat tidak kunjung membaik kesejahteraannya, asalkan mereka sendiri memperoleh banyak manfaat. Adalah mereka pula yang telah mengadakan amandemen terhadap UUD 1945 sehingga sekarang tidak lagi menjadi ketentuan hukum yang hendak menjadikan Pancasila kenyataan. Sebaliknya, UUD 1945 setelah dirobah melalui amandemen itu telah menjadi konstitusi yang menegakkan masyarakat berdasarkan individualisme-liberalisme.

Sebab itu, untuk menegakkan Pancasila di Indonesia harus diberikan prioritas pada langkah-langkah tertentu agar kemudian dapat dilakukan usaha meluas dalam pelaksanaan pekerjaan kita.

Prioritas Langkah

Prioritas dalam penentuan langkah penegakan Pancasila di bumi Indonesia penting sekali agar ada fokus dalam usaha besar yang kita jalankan

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tahun 1945 dirumuskan oleh Bung Karno dan Pendiri Bangsa Indonesia lainnya merupakan rumusan Pancasila yang menjadi Dasar Negara RI. Akan tetapi pada tahun 2002 konstitusi itu di-amandemen oleh mereka yang hendak menggeser Pancasila dari Indonesia, sehingga UUD itu telah



berubah menjadi satu konstitusi yang berhaluan individualisme-liberalisme. Untuk menjadikan Pancasila kenyataan di bumi Indonesia **Undang-Undang Dasar 1945 harus dikembalikan sebagai konstitusi yang berjiwa dan bersikap Pancasila**. Hal ini merupakan kewa jiban utama pertama yang harus dilakukan. Hal itu dapat dicapai dengan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 yang asli sebelum ada amandemen, atau melalui proses pengkajian dan perumusan kembali konstitusi yang sekarang sedang berlaku, yaitu yang namanya UUD 1945 tetapi isinya sudah berbeda secara mendasar dari mereka UUD 1945 yang sebenarnya.

Kedua, berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbaiki kembali, kehidupan bangsa harus diliputi semangat dan suasana **Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan**. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945, perwujudan dari UUD 1945 sangat

tergantung dari **Semangat Para Penyelenggara**. Para Penyelenggara Negara di Pusat dan Daerah harus benar-benar bersemangat dan yakin akan kebenaran usaha kita menegakkan Pancasila di Bumi Indonesia. Untuk itu perlu sekali mereka mewujudkan kondisi bangsa dan masyarakat yang **Gotong Royong**. Gotong Royong yang terdesak oleh paham Barat yang dibawa oleh kekuasaan politik, keunggulan ekonomi dan teknologi, serta kekuatan militer, harus hidup kembali. Harus dihilangkan pendapat bahwa sikap Gotong Royong yang mengejar Harmoni adalah inferior dibanding individualisme - liberalisme.

Berkembangnya kembali sikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan atau Gotong Royong juga amat penting untuk menjamin kehidupan tenteram damai antara umat agama yang berbeda, antara suku bangsa dan etnik dan antara golongan. Penetrasi pikiran yang mengutamakan individualisme-liberalisme makin kuat dan menyebabkan lemahnya sikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan atau Gotong Royong di masyarakat Indonesia dewasa ini. Tanpa sikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan akan amat sukar memelihara berkembangnya Pluralisme yang produktif, tenteram dan damai.

Rakyat Harus Sejahtera

Ketiga, Rakyat harus makin Sejahtera hidupnya. Pemerintah dan Legislatif di Pusat dan Daerah harus sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada Rakyat banyak dan tidak hanya mengutamakan kesejahteraan golongan kecil. Harus diutamakan perwujudan yang kongkrit dan nyata dalam mendatangkan kesejahteraan Rakyat, bukan tinggal berteori dan menunjukkan konsep-konsep yang bagus tanpa implementasi. Harus nyata bahwa Angka Kemiskinan terus menurun dan rakyat di mana-mana hidup makmur dalam keadilan. Diusahakan agar langkah demi langkah mayoritas bangsa menjadi golongan menengah yang penghasilannya cukup tinggi. Sebaliknya golongan miskin sesedikit mungkin jumlahnya, demikian pula yang masuk golongan kaya (*super rich*). Diusahakan

agar dalam masa 20 tahun mendatang sekurangnya dapat dicapai penghasilan sebesar USD 10.000 per kapita per tahun. Dan dalam masyarakat 85 % masuk golongan menengah, 10 % golongan kaya dan 5% golongan miskin.

Karena usaha ini tidak mungkin lepas dari perkembangan internasional, khususnya perkembangan di kawasan Asia Timur, maka bangsa Indonesia harus dibangun daya saingnya yang cukup kuat untuk dapat hidup bersama dengan bangsa lain secara harmonis dan tidak mengalami dominasi.

Usaha mencapai kesejahteraan yang tinggi bagi seluruh Rakyat, di samping memerlukan kebijakan ekonomi yang tepat dari Pengendali Negara juga memerlukan kegiatan rakyat yang penuh daya dan semangat juang untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan. Kebijakan ekonomi yang tepat adalah yang mengutamakan kepentingan dan kekuatan bangsa yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi yang tepat akan menggelorakan semangat rakyat untuk mengembangkan daya saing nasional yang kuat. Dapat dihilangkan kecenderungan menjadi Manusia Indonesia yang *manja mental* karena pengaruh Alam Lingkungan yang relatif murah dan mudah bagi Manusia Indonesia. Manusia Indonesia harus tidak kalah daya dan semangat juangnya dari Manusia Korea yang tanahnya hanya 30% dapat ditanami, tidak atau sedikit sekali memiliki potensi kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi, dan menghadapi cuaca yang tidak ringan di musim dingin. Dengan daya dan semangat juang yang kuat Manusia Indonesia akan dapat memanfaatkan secara maksimal segala kemurahan yang dilimpahkan Tuhan untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan. Sekali gus selalu pandai memelihara Alam Lingkungan itu agar dapat secara berlanjut memberikan sumber bagi penciptaan kehidupan yang maju dan sejahtera. Dengan kebijakan ekonomi yang tepat dan semangat juang rakyat yang menggelora segala potensi negara dan bangsa bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan bukannya malahan menjadikan bangsa lain sejahtera, sedangkan rakyat Indonesia tetap miskin. Hal itu amat penting untuk mengakhiri segala cemoohan bahwa Pancasila justru membuat

rakyat miskin dan karena itu sebaiknya ditinggalkan saja dan bangsa Indonesia mengambil Dasar Negara baru yang berbeda dari Pancasila.

Keempat, dibangun Sistem Politik berorientasi Rakyat Sejahtera. Dengan dasar Gotong Royong maka tidak boleh ada tempat bagi Sistem Politik yang penuh praktek Individualisme-Liberalisme sebagaimana sekarang terjadi. Kaum politisi harus memahami dan menyadari bahwa Pancasila menghendaki Demokrasi. Akan tetapi bagi Pancasila demokrasi tidak cukup demokrasi politik saja, melainkan harus berdampingan dengan demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Itu berarti bahwa ada Kebebasan penuh selama tidak mengganggu Harmoni Masyarakat. Ini berlaku bagi segenap perilaku anggota masyarakat dalam bidang apa pun, seperti kegiatan partai politik, pers dan dunia akademis. Harus pula dibatasi peran uang dalam pelaksanaan politik sehingga tidak lagi perkembangan politik didominasi uang seperti sekarang terjadi. Satu hal yang menjadi sumber meluasnya praktek korupsi di Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia amat lemah dan rawan dari dalam tubuhnya sendiri.

Memang kita, khususnya para pemimpin dan elit politik, menghadapi kewajiban yang berat untuk mengubah perilaku individualis yang terutama menghinggapi dunia politik sejak Reformasi. Segolongan tertentu di Indonesia, khususnya di lingkungan politik sangat menikmati keadaan sekarang yang telah membuat mereka kaya tanpa harus peduli pada jutaan rakyat yang miskin. Sebab itu mereka akan terus berusaha kuat mempertahankan keadaan yang merugikan bangsa ini. Apalagi kalau mereka adalah pembuat undang-undang dan peraturan negara yang mengikat. Akan tetapi kalau kita semua, termasuk para elit politik, cinta dan setia kepada Negara dan Bangsa, kewajiban itu akan dapat kita jalankan sehingga perkembangan politik benar-benar mendukung terwujudnya Pancasila sebagai kenyataan di Indonesia.

Tegakkan Kekuasaan Hukum

Kelima, harus kita tegakkan **Kekuasaan Hukum.** Harus kita sadari, bahwa pada dasarnya Manusia

Indonesia tunduk pada hukum, sebagaimana kita lihat pada kuatnya pengaruh Hukum Adat dalam masyarakat hingga kini. Perilaku itu mengalami gangguan ketika kita menjalankan Revolusi dari tahun 1945 hingga 1950. Pada waktu itu sikap revolusioner mendorong Manusia Indonesia untuk tidak mengakui hukum yang berasal dari zaman kolonial. Manusia Indonesia menganggap bahwa segala sisa penjajahan harus dicabut, termasuk segala ketentuan hukum dan peraturan. Akan tetapi setelah Revolusi selesai pada tahun 1950 kita lalai untuk menegakkan kembali hukum, yaitu Hukum Negara Republik Indonesia Merdeka. Akibatnya adalah bahwa sifat tunduk pada hukum yang diperlukan setiap susunan kehidupan kita abaikan dan tidak kembali ke sifat taat kepada hukum seperti sebelum Revolusi. Republik Indonesia yang secara resmi satu Negara Hukum, dalam kenyataan sekarang penuh lubangnya sehingga yang berkuasa adalah Kekuatan dan Uang. Tidak mengherankan kalau Korupsi dan berbagai pelanggaran hukum merajalela dan hingga kini masih terus saja terjadi. Akan tetapi itu bukan Jatidiri Indonesia dan harus dilenyapkan secepatnya karena menggerogoti kehidupan bangsa baik secara material maupun mental. Tanpa kekuasaan hukum tidak mungkin Pancasila menjadi kenyataan. Yang terwujud adalah masyarakat preman di mana pihak yang kuat menentukan segala kehidupan. Baik kuat dalam Uang, kuat Jasmani dan kuat karena merebut Kekuasaan. Tidak mungkin Gotong Royong terwujud dan rakyat tidak akan pernah sejahtera. Sebab itu para pemimpin harus benar-benar mengusahakan tegaknya Hukum di Indonesia.

Keenam, Pendidikan harus kita selenggarakan secara baik. Meliputi Pendidikan dalam Keluarga, Pendidikan Sekolah maupun Pendidikan dalam Masyarakat. Harus kita sadari bahwa masa depan bangsa sangat tergantung pada Pendidikan yang kita lakukan. Juga tegaknya Pancasila sebagai Jatidiri Bangsa dalam percaturan umat manusia yang makin dinamis sangat tergantung pada Pendidikan Manusia Indonesia.

Semua orang tua wajib menjalankan Pendidikan yang baik dalam lingkungan Keluarga, karena itu menjadi landasan bagi setiap Manusia Indonesia

bagi perkembangan dalam hidupnya. Terutama pembentukan budi pekerti luhur dan karakter kuat sudah harus dimulai sejak usia dini dan itu landasannya berada dalam keluarga.

Kemudian Pendidikan Sekolah harus dilakukan dengan baik. Dilanjutkan pembentukan budi pekerti dan karakter yang dimulai dalam Keluarga, digabungkan dengan menumbuhkan pemahaman dan kecakapan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini semua menjadikan anak Indonesia berkembang menjadi Manusia yang dapat hidup secara mandiri dan menentukan langkah-langkahnya untuk membangun kehidupan yang makin maju, baik bagi dirinya maupun masyarakat dan bangsa.

Bersamaan dengan itu adalah Pendidikan dalam Masyarakat dengan berbagai bentuknya yang penting untuk makin memberikan landasan paripurna bagi perkembangan Manusia Indonesia. Dengan begitu Manusia Indonesia, di satu pihak menjadi orang yang cakap hidup dalam alam modern dan arus globalisasi, di pihak lain ia sadar akan kebangsaannya sebagai faktor penting dalam hidupnya. Ia akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi bangsanya karena itu juga bermanfaat bagi dirinya.

Sudah jelas bahwa perlu disediakan dana dan fasilitas memadai bagi penyelenggaraan Pendidikan yang baik. Itu sebabnya perkembangan Rakyat Sejahtera adalah amat penting, karena hanya Rakyat Sejahtera yang dapat menghasilkan Negara Kuat. Hanya Rakyat Sejahtera yang dapat menyediakan *revenue* atau pemasukan bagi Negara untuk membiayai Pendidikan secara memadai. Sebab usaha harus tertuju kepada Pendidikan Sekolah Pemerintah yang bebas biaya atau tidak membayar untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua anak didik yang berasal dari berbagai strata masyarakat.

Ketujuh, ada pelaksanaan Otonomi Daerah yang bersemangat dan bersikap Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Tujuan Otonomi Daerah adalah memberikan kesempatan luas kepada Rakyat di mana-mana

untuk membangun kehidupan yang maju, adil dan sejahtera. Di masa lalu telah terjadi sentralisasi yang berlebihan dalam pengelolaan negara yang kurang memperhatikan Daerah. Akan tetapi setelah Reformasi timbul hal sebaliknya ketika Daerah Tingkat Dua secara berlebihan mengembangkan kekuasaannya. Hubungan dengan Provinsi atau Daerah Tingkat Satu menjadi kurang harmonis, apalagi dengan Pusat. Di sini nampak lagi sifat individualisme-liberalisme yang negatif sekali dan merugikan keseluruhannya. Maka itu perlu sekali disadari kembali bahwa dengan Otonomi Daerah kita hendak membawa kesejahteraan sebesar-besarnya kepada Rakyat di seluruh Indonesia. Akan tetapi kesejahteraan itu hanya dapat terwujud dengan maksimal kalau Rakyat di Daerah juga memperhatikan kepentingan Pusat sebagai perwujudan Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Sangat penting dalam hal semangat para penyelenggara Negara di Pusat dan Daerah.

Peran Kepemimpinan Nasional Yang Amat Penting

Pelaksanaan usaha ini sangat dipengaruhi Kepemimpinan Nasional yang dipilih bangsa Indonesia.






Tidak mungkin Pancasila menjadi Kenyataan di Bumi Indonesia kalau Kepemimpinan Nasional tidak terdiri dari orang-orang yang penuh keyakinannya kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Keyakinan yang kuat itu mendorong Kepemimpinan Nasional untuk melakukan berbagai usaha agar Pancasila sungguh-sungguh menjadi Kenyataan di Indonesia, bukan hanya menjadikan Pancasila slogan atau wacana belaka. Keyakinan Kepemimpinan Nasional yang kuat itu akan berpengaruh luas pada masyarakat, baik di Pusat maupun Daerah, sehingga rakyat Indonesia makin kuat pula keyakinannya pada Pancasila Dasar Negara RI.

Dengan dasar itu Kepemimpinan Nasional mempunyai **keberanian** untuk melakukan program prioritasnya sehingga sungguh-sungguh terwujud. Ini berarti sanggup mengutamakan hal-hal yang

perlu dilakukan lebih dahulu agar dana yang tersedia benar-benar terpakai secara efektif untuk mendukung terwujudnya prioritas itu secara nyata. Kalau ditetapkan bahwa perwujudan Kesejahteraan Rakyat dilandasi Pembangunan Pertanian, maka Kepemimpinan Nasional sanggup dan berani untuk menetapkan penggunaan dana yang tersedia untuk secepatnya terwujud Sektor Pertanian yang produktif dan kuat daya saingnya, sehingga menjadikan Rakyat Petani golongan masyarakat yang sejahtera. Selama Kepemimpinan Nasional kurang keberanian untuk bertindak demikian maka tidak akan pernah terjadi fokus dalam pembangunan sehingga tidak pernah ada yang berkembang menjadi kekuatan nyata. Sebagaimana dalam dunia militer seorang panglima yang ingin mempertahankan semua hal, tidak akan dapat membangun pertahanan yang efektif. Sebab selalu dalam kehidupan, apalagi dalam perjuangan tidak pernah ada dana yang mencukupi bagi mengusahakan segalanya secara efektif sekali gus. Kurang ada keberanian pada Kepemimpinan Nasional untuk fokus merupakan sebab utama mengapa hingga kini tidak ada satu sektor pun dalam kehidupan nasional yang merupakan kekuatan yang nyata. Ketika dalam Orde Baru diperoleh *windfall profit* dari minyak pemerintah tak berani memanfaatkan dana besar yang dikuasai untuk mewujudkan kekuatan nyata, melainkan dana itu disebar ke berbagai program yang akhirnya tak ada yang menonjol sebagai kekuatan.

Sebab itu Kepemimpinan Nasional dalam menjalankan usaha secara berani dan penuh tanggungjawab, selalu menjadikan Kepentingan Nasional ukuran bagi penentuan prioritasnya. Bukan kepentingan golongan, apalagi kepentingan diri dan keluarganya atau partainya. Di pihak lain

PANCASILA, THE FIVE PRINCIPLES
 Today, the values of *Pancasila* constitute the state policy and the life philosophy of all Indonesians.

<p>The star.</p> 	<p>1 Belief in one supreme God Indonesians believe in a God and most follow one of four great world religions—Islam, Buddhism, Hinduism, or Christianity.</p>
<p>The unbroken chain of humanity (the circles represent women, the square men).</p> 	<p>2 Humanitarian Ideals Indonesians do not tolerate oppression, either physical or spiritual.</p>
<p>The banyan tree.</p> 	<p>3 National unity In 1928 Indonesia's youth pledged to have one country, one nation, and one language, binding together the diverse peoples of the archipelago.</p>
<p>The head of a wild buffalo</p> 	<p>4 Indonesian-style democracy There is discussion (<i>musyawarah</i>) and mutual assistance (<i>gotong royong</i>) to reach consensus (<i>mufakat</i>). It is also referred to as <i>Pancasila-style democracy</i>.</p>
<p>Sprigs of cotton and rice.</p> 	<p>5 Social Justice An equal distribution of welfare and the protection of the weak.</p>

diunduh dari : (octovary.blogspot.com)

Kepemimpinan Nasional dapat membangun kepercayaan pada seluruh bangsa bahwa usahanya adalah untuk kepentingan semuanya. Bahwa akan selalu diusahakan agar dengan cepat dan dana minimal satu prioritas dapat diselesaikan dan wujudkan sehingga kemudian beralih kepada fokus berikut yang penting. Sebaliknya Kepemimpinan Nasional dapat menjauhkan sifat yang mengutamakan wacana belaka tanpa ada usaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang dibicarakan.

Karena segala usaha menjadikan Pancasila Kenyataan di Indonesia tidak pernah lepas dari perkembangan di keliling Indonesia dan dunia internasional pada umumnya, Kepemimpinan Nasional harus selalu tegas dalam menempuh politik internasional yang Bebas Aktif. Ketegasan itu dilaksanakan dengan kearifan dan elegant sehingga Indonesia dapat menjadikan semua pihak bersahabat, tanpa Indonesia terlibat secara negatif dalam berbagai sengketa internasional. Khususnya



diunduh dari : (islamwillneverdie.blogspot.com)

dalam persaingan yang makin kuat antara AS dan China dalam posisi dan supremasi dunia, politik luar negeri yang dijalankan Kepemimpinan Nasional harus aktif dan selalu independent untuk kepentingan nasional Indonesia. Kelemahan dalam menjalankan itu dapat berakibat sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah peran Kepemimpinan Nasional mendorong kemajuan setiap daerah tanpa menimbulkan kerugian pada daerah-daerah lain dan selalu dalam keutuhan Negara Kesatuan RI. Peran sector Pendidikan amat penting untuk menjadikan setiap daerah makin maju rakyatnya sehingga tidak ada lagi perbedaan mencolok antara daerah satu dengan yang lain. Sebab itu Kepemimpinan Nasional perlu mengembangkan kebijakan Pendidikan yang tepat dan diimplementasikan di semua Daerah di Indonesia dengan perhatian tinggi dari Pimpinan Daerah.

Kepemimpinan Nasional harus selalu waspada adanya kerawanan di daerah tertentu dan di perbatasan negara yang dapat mengakibatkan dampak negative bagi eksistensi NKRI.

Setelah Prioritas Menjadi Kenyataan

Dengan menjadikan Tujuh Prioritas di atas kenyataan di Bumi Indonesia makin

terwujud kondisi obyektif yang memungkinkan Pancasila menjadi kenyataan di Bumi Indonesia. Itu berarti juga makin nyata dan kuat Jatidiri Bangsa,. Dengan begitu makin kuat **Percaya Diri** bangsa Indonesia dan juga makin kokoh kehidupan bangsa terhadap berbagai gangguan dan seruan yang dapat menjerumuskan bangsa. Seperti kehendak untuk membuang Pancasila dan menggantikannya dengan pandangan dan sikap yang berasal dari ideologi dan bangsa lain. Juga akan sangat berkurang berbagai gangguan keamanan dalam negeri yang sering timbul karena kehidupan

rakyat yang miskin dan menderita.

Dan dengan Pancasila yang kokoh kita makin dapat memperkaya kehidupan kita dengan berbagai **“pinjaman budaya”** bangsa lain untuk makin memperkuat dan memperkaya kehidupan bangsa Indonesia tanpa perlu khawatir bahwa itu akan merugikan kita. Sejak masa lalu bangsa Indonesia pandai melakukan “pinjaman budaya” itu, tetapi ketika mengalami penjajahan yang lama hal itu berubah menjadi dominasi budaya lain terhadap bangsa Indonesia. Maka setelah Jati Diri bangsa Indonesia kuat kembali, kita akan makin mampu menghadapi globalisasi dengan dinamikanya serta segala dampak positif dan negatifnya tanpa mengalami kerugian bagi Negara dan Bangsa. Juga makin mampu menghadapi berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi pada Umat Manusia dan Bumi, sebagaimana sekarang sudah dimulai dengan terjadi Krisis Ekonomi yang menghantam seluruh penghuni Dunia.

Dengan begitu bangsa Indonesia akan berkembang makin maju dan sejahtera serta Negara Republik Indonesia makin kokoh eksistensinya. Bangsa Indonesia juga makin mampu mengembangkan peran yang positif dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan perdamaian dunia.



Kantor Ranting LVRI Kecamatan Cimerak Kab. Ciamis Jawa Barat terawat rapi dan bersih



Kantor Ranting LVRI dan PRIMKOVERI Ranting Kecamatan PARIGI Kabupaten Ciamis mampu menunjang pelaksanaan tugas dan menyejahterakan warganya



Sebagai wujud nyata dari adanya upaya nyata optimal dari Veteran yang berdomisili di pesisir selatan Kab. Ciamis dan kepedulian unsur Muspika



Tampil setara dengan Ranting LVRI lainnya di pesisir selatan Kabupaten Ciamis, yang berupaya bersinergi dengan Muspika menjejatarkan warganya



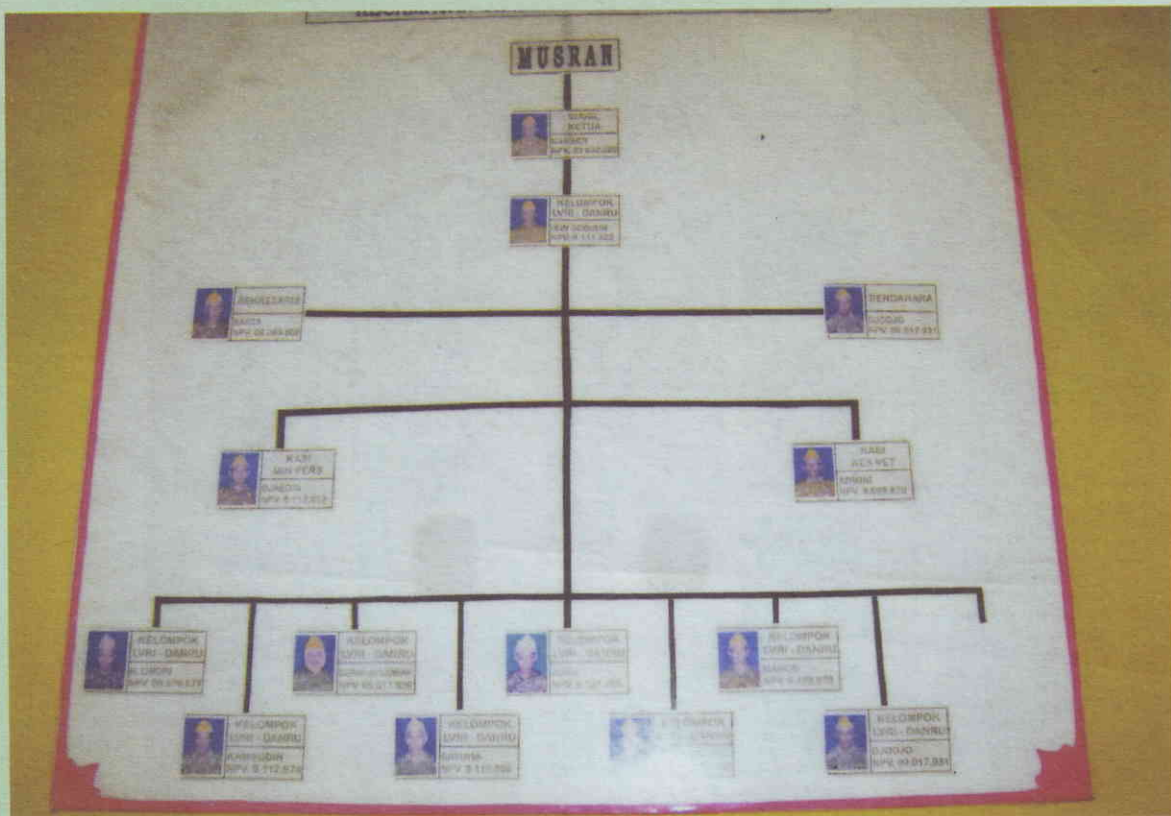
Seorang wanita anggota Veteran RI di NTT di depan tempat tinggalnya, dengan bangga mengenakan peci Veteran RI



Bapak Mahri, Ketua Ranting LVRI Kec. Parigi



Bapak Samidi beserta Istri Ketua Ranting LVRI Kec.Cimerak



Struktur Organisasi pada setiap Ranting LVRI di Kec.Pangandaran, Kec.parigi, Kec.Cijulang dan Kec.Cimerak

MUKERNAS LVRI 2010

OLEH DASMAN DJAMALUDDIN

“Semakin mundurnya kondisi para Veteran Pejuang Kemerdekaan, karena di makan usia, maka program regenerasi atau tepatnya estafet kepemimpinan di dalam tubuh organisasi LVRI, baik di Pusat maupun Daerah, dari para Veteran Pejuang Kemerdekaan kepada generasi Veteran Pembela Kemerdekaan secara alamiah harus segera kita realisasikan.” (Rais Abin)

Tanggal 10 hingga 13 Januari 2010 lalu, suasana di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta tidak seperti biasanya. Wajah-wajah ceria yang penuh semangat dari para pimpinan organisasi di tingkat Pusat dan Daerah mewarnai kehadiran mereka di awal pembukaan Mu syawarah Kerja Nasional (Mukernas) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Mereka terdiri dari para pejuang kemerdekaan, pejuang Trikora, Dwikora dan banyak di antaranya terlibat pula dalam operasi Seroja di Timor Timur, yang kemudian disebut Veteran Pembela Kemerdekaan.

Semangat tetap mewarnai acara Mukernas LVRI itu, meski usia mereka sudah tidak muda lagi. Apalagi kalau berbicara mengenai pejuang kemerdekaan, ada yang sudah mencapai 84 tahun, bahkan lebih. Tanpa menepuk dada, Veteran Pejuang adalah saksi hidup dan pelaku sejarah. Pejuang yang tanpa pamrih membantu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pra Pembukaan Mukernas

Sebelum Mukernas tahun 2010 dilaksanakan, terlebih dahulu diselenggarakan acara Malam Silaturahmi, agar ada kesempatan mengungkapkan ucapan “Selamat Datang”, kepada para peserta oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LVRI, Rais Abin.

Selain acara Malam Silaturahmi, diadakan pula upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata pada hari Senin, 11 Januari 2010 yang dimulai pada pukul 08.00 WIB yang pada saat bersamaan menyambut Hari Ulang Tahun ke-53 LVRI.

Upacara berjalan khidmat, lancar dan tertib, lebih cepat dari alokasi waktu yang ditentukan.



Bapak Rais Abin membuka Mukernas 2010

Bertindak sebagai Pimpinan Rombongan adalah Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) Rais Abin, yang diikuti peserta upacara terdiri dari seluruh Peserta Mukernas, Pemuda Panca Marga dan Siswa SMA/SMK, semuanya berjumlah sekitar 350 orang. Puncak acara ziarah adalah peletakan Karangany Bunga yang dilakukan Pimpinan Rombongan dan Perwakilan Generasi Muda terdiri dari tiga orang siswa, masing-masing secara bersama-sama meletakkan karangan bunga di Tugu Monumen.

Selain itu dilakukan acara Tabur Bunga, khususnya di makam para Veteran Pejuang Kemerdekaan oleh pimpinan rombongan, diikuti oleh seluruh peserta upacara, kecuali siswa-siswi SMA/SMK meneruskan mengikuti ceramah tentang Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Diikuti sertakannya para siswa SMA/SMK dalam Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata adalah untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dan rasa cinta bangsa.

Pembukaan Mukernas

SELESAI melaksanakan Ziarah di Taman

Makam Pahlawan Nasional Kalibata pada pukul 11.00 WIB, pada pukul 13.00 WIB dimulailah pembukaan Mukernas dengan diawali menyanyikan lagu "Indonesia Raya," dan lagu "Mars Veteran.", diikuti dengan mengheningkan cipta dan pembacaan doa. Kemudian Ketua Panitia Bapak H.B.L Mantiri melaporkan kesiapan Mukernas yang dihadiri oleh seluruh Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Daerah LVRI kecuali Kalimantan Tengah yang absen karena sakit, seluruh anak organisasi dan badan pendukung dan para Dewan Pimpinan Pusat LVRI serta Wantimpus LVRI yang diwakili oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.

Selanjutnya pemukulan "Gong" sebagai tanda dimulainya kegiatan Mukernas LVRI 2010 oleh Ketua Umum DPP LVRI yang didampingi oleh Wakil Ketua Wantimpus LVRI dan Ketua Panitia.

Dalam kata sambutannya Ketua Umum Rais Abin menekankan pentingnya regenerasi di dalam tubuh LVRI. Sejak lahirnya LVRI tahun 1956 sudah saatnya para Veteran Pejuang Kemerdekaan memberikan estafetnya kepada para Veteran Pembela Kemerdekaan.

"Semakin mundurnya kondisi para Veteran Pejuang Kemerdekaan, karena di makan usia, maka program regenerasi atau tepatnya estafet kepemimpinan di dalam tubuh organisasi LVRI, baik di Pusat maupun Daerah, dari para Veteran Pejuang Kemerdekaan kepada generasi Veteran Pembela Kemerdekaan secara alamiah harus segera kita realisasikan," ujar Rais Abin.

Menurut Rais Abin, musyawarah ini penting sebagai langkah pertama persiapan beralihnya kepemimpinan para Veteran pejuang yang diakui aktif dalam menegakkan Republik ini dari tahun 1945-1999 mengendalikan Legiun Veteran Republik Indonesia.

"Pada Kongres X tahun 2012 yang akan datang, kepemimpinan LVRI akan berada di tangan para Veteran Pembela, para penerus yang pernah aktif dalam operasi Trikora, Dwikora dan Seroja. Regenerasi tidak dapat dihindari, sesuai dengan gema reformasi. Demi penyelamatan organisasi Veteran, satu-satunya yang disahkan dengan Undang-Undang dan dipercaya sebagai wadah pemersatu para pejuang bangsa," tegas Rais Abin.

Selanjutnya pesan yang disampaikan Veteran Pejuang dalam menghadapi keadaan bangsa dan negara dewasa ini, tanpa harus mengkaitkan siapa presidennya, LVRI mengeluarkan sebuah seruan dan menyatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan nasional Indonesia sangat ditentukan oleh:

- Keyakinan menjunjung tinggi Pancasila sebagai sumpah sakti bangsa
- Kemampuan melaksanakan kepemimpinan dengan tauladan
- Kemampuan mengikis habis feodalisme di segala bidang pemerintahan
- Kemampuan menguasai dan menghormati sejarah bangsa

Mempertegas Komitmen LVRI

MUSYAWARAH LVRI yang dilaksanakan sudah tentu ingin mempertegas tiga tujuan utamanya:

Pertama, Veteran Republik Indonesia sebagai pembina potensi nasional tetap melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, mewujudkan kesejahteraan, utamanya di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan para anggota LVRI.

Ketiga, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, LVRI ikut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Sekaligus ikut serta meninfgkatkan persahabatan antar bangsa-bangsa di dunia.

Kerja Sama Yang Baik

Kerja sama yang baik merupakan elemen penting buat LVRI. H.B.L. Mantiri, Ketua Panitia Musyawarah Kerja Nasional LVRI yang adalah juga Wakil Ketua Umum II DPP LVRI, menyatakan perlu dilaksanakan pendekatan secara khusus antara LVRI dengan elemen Pemerintah, elemen Legislasi, elemen Yudikasi: setingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Sasaran dalam kemitraan LVRI memiliki tanggung jawab moril untuk ikut berperan dalam mencari solusi atas masalah yang kritis apabila hal ini terjadi dan dihadapi Negara dan Bangsa dengan cara tidak melibatkan diri ke dalam politik

praktis. LVRI berkewajiban memberikan saran pemikiran maupun pertimbangan kepada pemerintah maupun instansi lainnya, baik diminta maupun tidak,” jelas Mantiri.

Juga Mantiri berharap, di dalam rangka memelihara semangat perjuangan bagi generasi muda penerus bangsa, LVRI hendaknya jangan terpukau pada kedekatannya kepada keluarga Veteran, tetapi juga pro-aktif dalam mengajak generasi muda lainnya di luar lingkup keluarga Veteran. Pembinaan terhadap generasi muda penerus cita-cita perjuangan, hendaknya ditampilkan ke dalam suatu sikap, penampilan dan perilaku yang pantas untuk diteladani generasi muda, suatu sikap bersahabat untuk mengingatkan generasi muda kepada nilai luhur perjuangan para Veteran pendahulu mereka. Penyebarluasan kembali ingatan perjuangan di masa lalu dalam bentuk ceramah, peringatan hari bersejarah, pemutaran audio visual, film dokumenter yang dilaksanakan dalam konteks hubungan antar lembaga oleh Veteran RI, baik secara perorangan maupun institusi LVRI di semua tingkatan, akan dapat menggugah kembali nilai kejuangan dan patriotisme di kalangan generasi muda.

Beberapa Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi LVRI yang dikemukakan Mantiri setelah mendengar laporan dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah :

TENTANG Tahorvet, masih banyak persoalan yang dihadapi, antara lain banyak perorangan yang sudah mengajukan permohonan untuk memperoleh Tahorvet sejak lama, beberapa tahun yang sudah berjalan, tetapi masih belum juga memperoleh Skep pengakuan sebagai Veteran, baik Veteran Pejuang Kemerdekaan, maupun Veteran Pembela dari sejak pertama kalinya dibuka kesempatan untuk mendaftar sampai dengan kesempatan yang dibuka sejak 2007 sampai dengan akhir 2009, masih belum dapat menuntaskan persoalan ini.

Dengan tidak menghitung besaran angka-angka, semua paham bahwa masih banyak terdengar Nomor Pokok Veteran yang digunakan oleh dua atau tiga orang Veteran dan/atau NPV asli tapi palsu. Ada NPV yang digunakan oleh seseorang,



Para Peserta Mukernas 2010

tetapi tidak terdaftar di bagian administrasi pencatatan Tahorvet di Kementerian Pertahanan.

Pada saat ini masih banyak pemohon Tahorvet yang terhambat karena harus melampirkan pernyataan Surat Perintah Penugasan Operasi, padahal pada kenyataannya pada saat berangkat tugas operasi tidak dibekali surat perintah tugas bagi perorangan dan/atau memang tidak lagi mengarsipkan dengan tertib surat yang sangat berharga tersebut.

TENTANG Tuvet (Tunjangan Veteran). Masih banyak antrian panjang dalam proses penyelesaian administrasi penertiban Skep Tuvet di Kementerian Pertahanan, sehingga harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat dicatat sebagai yang berhak memperoleh Skep Tuvet. Setelah Skep diperoleh, masih ada lagi masalah penafsiran yang berbeda terhadap bunyi aturan Undang-Undang tentang Tuvet, misalnya penafsiran bahwa pemberian Tuvet hanya kepada anggota yang bertugas sebagai perajurit tempur, bukan unsur pelayanan Administrasi-Logistik-Intelijen, sehingga seringkali terjadi penafsiran Tuvet dari Kementerian Pertahanan, tidak diberikan Tunjangan Veteran oleh TASPEN.

Para penerima Tuvet yang sudah menikmati tunjangan untuk beberapa lama, tiba-tiba dihentikan tunjangannya karena diketahui ada pemakaian satu NPV oleh lebih dari satu orang Veteran. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah bagi yang bersangkutan bersama keluarganya, pada hal belum

tentu kekeliruan administrasi ini sebagai ulah salah atau penyelewengan dari yang bersangkutan.

TENTANG masalah Tunjangan Janda Veteran, masih banyak yang perlu disesuaikan agar dapat benar-benar memberikan rasa sejahtera kepada para janda Veteran yang berhak. Dengan tidak menutup mata bahwa ternyata memang ada oknum yang menyalahgunakan kesempatan untuk kepentingan dirinya dan merugikan orang lain.

TENTANG Dahorvet (Dana Kehormatan Veteran), memang masih harus disesuaikan besaran angkanya agar dapat menambah pendapatan para Veteran dalam menutupi kebutuhan hidup minimalnya. DKV merupakan salah satu kepedulian Pemerintah kepada warganya yang telah mendarmabaktikan dirinya bagi kedaulatan NKRI. Jadi bukan sebagai salah satu ulah mengingkari tekad para Veteran yang sejak kelahirannya siap berjuang tanpa pamrih.

Tentang Tahorvet, Tuvet dan Dahorvet, Mantiri berpendapat bahwa semuanya telah ada aturannya. Tetapi pelaksanaannya sangat tergantung kepada pihak-pihak terkait, jadi tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan LVRI. LVRI hanya bisa berusaha untuk mendorong dan membangkitkan semangat semua pihak yang terkait agar mereka bisa lebih cepat dan bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Selain kesejahteraan para anggota Veteran, organisasi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 1967 dan penjabarannya selalu diperbaharui. Untuk tahun 2010 sudah terbit Peraturan Menteri Dalam negeri No.25 Tahun 2009 tentang "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010." Rinciannya termaktub dalam Bab II Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan APBD, Pasal 2 (ayat 1) tentang "Belanja Hibah dan Bantuan Sosial."

Dalam hal ini Warga Veteran termasuk yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Oleh karena itu ada peluang bagi Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah daerah

di daerahnya masing-masing untuk menutupi kebutuhan organisasi dalam format kebutuhan Dana Operasional pertahun anggaran. Sebaiknya permohonan diajukan sebelum waktu penyusunan APBD di daerahnya.

Diakui bahwa kepedulian para pejabat di daerah sangat beragam. Ada yang pemurah sesuai aturan, tetapi ada pula yang penghati-hati (*Prudent*). Dengan demikian, perlu upaya yang konsisten dan simpatik untuk dapat membuka kunci empati pejabat pemerintah kepada ekspektasi Veteran dalam membina organisasi. Komunikasi dan koordinasi dalam wujud sillaturahim perlu terus digalakan agar Veteran semakin dikenal dan dipenuhi harapan-harapannya dalam mengoptimalkan kinerja organisasi Veteran. Hanya dengan tampil ramah dan simpatik merupakan keniscayaan dalam bersilaturrahi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*). Sebaliknya cara-cara dan penampilan tidak sabar, emosional pada saat berkomunikasi dan bersilaturrahi dengan para pemangku kepentingan sudah harus ditinggalkan. Karena di samping merusak hubungan antar individu/ *interpersonal relationship*, juga berdampak kurang menguntungkan bagi hubungan baik antar kelembagaan.

Selain itu, hubungan di antara sesama Veteran dan organisasi Veteran atau sesama organisasi LVRI dengan organisasi bernaifaskan perjuangan kemerdekaan lainnya, tidak selalu harmonis. Hubungan kelembagaan antara LVRI di semua tingkatan dengan sesama organisasi Veteran wajib menyadari bahwa sesuai Undang-Undang Veteran, Organisasi Veteran hanya mengenal satu wadah yaitu LVRI. Hal ini harus menjadi dorongan untuk menyelesaikan friksi yang timbul antara sesama organisasi Veteran untuk secara harmonis berada dalam satu wadah LVRI. Selain itu hubungan antara LVRI dengan mitra pejuang lainnya seperti Dewan Harian Nasional (DHN) '45, Pepabri atau organisasi lainnya harus dilaksanakan agar pandangan terhadap nilai perjuangan kemerdekaan serta keutuhan NKRI tidak berbeda, apalagi terpecah, sehingga dapat merugikan citra sesama elemen pejuang RI.

BERAKHIRNYA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT KEMBALI NKRI BERKUASA DI INDONESIA

OLEH SAYIDIMAN SURYOHADIPROJO



Serangan militer Belanda terhadap RI pada tanggal 19 Desember 1948 ternyata tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan para pemimpin Belanda. Sekalipun serangan mendadak itu secara militer berhasil merebut Yogyakarta, ibukota Revolusi RI secara cepat, namun kemudian Belanda tidak dapat memperoleh hasil politik yang diinginkan.

Tujuan politik Belanda adalah menaklukkan Republik Indonesia dan meniadakannya sebagai kenyataan politik. Sebab selama RI itu ada, Belanda tak dapat menegakkan kembali kekuasaan penjajahannya atas bumi Indonesia. Padahal Belanda sangat terdesak dalam segi keuangannya, karena AS sebagai sumber bantuan utama tidak memberikan bantuan keuangan yang cukup bagi Belanda untuk mengembangkan negaranya dan menguasai kembali Indonesia. Sebab itu di samping Tujuan Politik Belanda mempunyai Tujuan Ekonomi, yaitu secepat mungkin menguasai Indonesia untuk menghidupkan kembali usaha perkebunan guna memperoleh pemasukan penting bagi kas negaranya.

Perlawanan Rakyat Indonesia bersama Tentara

Nasional Indonesia tidak berhasil dipatahkan Belanda hanya dengan merebut Yogyakarta dan kota-kota lain di Jawa dan Sumatra. Berkobar perlawanan itu dan makin merugikan Belanda, baik secara politik maupun militer. Terbukti kebenaran dalil bahwa gerilya menang selama lawan tak mampu menghiskannya secara tuntas. Perlawanan itu tidak memungkinkan Belanda mencapai Tujuan Ekonominya, karena perkebunan-perkebunan tidak dapat berproduksi dengan baik dan lalu lintas antar-kota sangat terganggu atau bahkan putus sama sekali akibat perlawanan gerilya TNI bersama Rakyat.

Sejak permulaan serangan Belanda kaum diplomat RI di luar negeri sudah beraksi dan berhasil mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyalahkan Belanda melakukan serangan 19 Desember 1948. Pada tanggal 26 Januari 1949 Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam serangan Belanda tersebut, dan menuntut agar kekuasaan RI ditegakkan kembali serta dilanjutkan perundingan antara pihak RI dan Belanda untuk mencapai penyelesaian damai, sebagaimana sedang dilakukan sebelum Belanda menyerang.

Atas dasar keputusan itu perundingan antara kedua pihak dibuka kembali dengan Mr. Mohamad Roem sebagai ketua delegasi RI dan Dr van Roijen sebagai ketua delegasi Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1949 diputuskan tegaknya kembali pemerintahan RI. Atas dasar itu Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Mohamad Hatta kembali ke Yogyakarta dari tempat penahanan di Bangka untuk memegang kembali pimpinan pemerintahan RI.

Dalam persetujuan Roem-Van Roijen juga disepakati bahwa akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda untuk proses

penyerahan kedaulatan Belanda atas wilayah Indonesia kepada bangsa Indonesia. Untuk itu harus diadakan penghentian permusuhan terlebih dahulu antara Indonesia dan Belanda.

Maka pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta kembali ke Yogyakarta untuk memimpin kembali pemerintah RI. Panglima Besar Sudirman yang tidak bersedia turut ditahan Belanda, sekalipun dalam kondisi kurang sehat, selama Perang Kemerdekaan terus memimpin perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Maka Pak Dirman yang berada di daerah gerilya di Jawa Timur diminta pulang ke Yogyakarta.

Dalam pertemuan dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta dijelaskan kepada Pak Dirman bahwa dalam waktu dekat akan diadakan KMB antara RI dan Belanda untuk penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada bangsa Indonesia. Untuk itu harus diadakan penghentian permusuhan dan diminta kepada Panglima Besar agar mengeluarkan perintah penghentian permusuhan kepada seluruh pasukan TNI dan rakyat yang melawan.

Pak Dirman menyatakan tidak keberatan ada KMB tetapi jangan terlalu cepat. Sebab waktu itu perlawanan TNI bersama Rakyat sedang memetik banyak keuntungan di mana-mana. Kalau itu dilanjutkan dulu maka RI akan mempunyai posisi atau *leverage* yang lebih kuat dalam perundingan. Akan tetapi Bung Karno menyatakan bahwa KMB harus diadakan dalam tahun 1949 agar pada permulaan 1950 kedaulatan sudah ada di tangan bangsa Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta minta dukungan Pak Dirman, dan tanpa itu Dwi Tunggal tidak bersedia melanjutkan kepemimpinan atas bangsa Indonesia. Dengan sangat berat bahkan dengan meneteskan air mata Pak Dirman menyatakan dukungannya, karena sadar bahwa kepemimpinan Dwi Tunggal mutlak diperlukan untuk keberhasilan perjuangan nasional.

Kemudian dikeluarkan perintah penghentian

permusuhan yang mengakhiri seluruh perlawanan TNI bersama Rakyat terhadap Belanda.

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilakukan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB sebenarnya merupakan satu pertemuan antara delegasi-delegasi Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Nederland atau Belanda sebagai dua pihak yang bermusuhan. Akan tetapi di samping dua delegasi itu hadir pula delegasi dari apa yang dinamakan *Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO)*, yaitu kumpulan negara-negara boneka ciptaan Belanda di Indonesia sejak tahun 1945.

Dalam KMB pihak Amerika Serikat bertindak sebagai penengah.

Ternyata sejak tahun 1946 dibawah pimpinan RI sudah ada persetujuan bahwa negara Indonesia yang dibentuk setelah pengakuan kedaulatan bangsa adalah satu negara federal yang memberi tempat bagi negara-negara yang telah dibuat Belanda sejak usahanya menaklukkan RI. Mungkin sekali ini adalah kompromis yang disetujui pimpinan RI dalam berbagai perundingan antara RI dan Belanda yang mula-mula ditengahi Inggris, kemudian dilakukan oleh satu Komisi Tiga Negara (KTN) dengan Amerika Serikat sebagai ketua dan Australia (yang dipilih RI) dan Kanada (yang dipilih Belanda) sebagai anggota.

Atas dasar kompromis untuk menerima negara boneka Belanda sebagai bagian negara federal, maka pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949 di Yogya diadakan *Inter-Indonesian Conference* antara pimpinan RI dan pimpinan negara-negara buatan Belanda itu. Konferensi itu diadakan untuk menghadapi KMB serta bentuk negara federal yang akan dibentuk.

Keputusan KMB di Den Haag adalah :

- Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada negara Republik Indonesia Serikat (RIS), kecuali Irian Barat.
- Dibentuk Uni Indonesia – Belanda di bawah Mahkota Belanda.

- Semua hutang Hindia Belanda beralih ke RIS.
- TNI yang menjadi Angkatan Perang RIS menerima semua personil bekas tentara Hindia Belanda (KNIL) yang tidak turut ke Belanda.

Dengan keputusan itu maka Republik Indonesia (RI) menjadi satu negara bagian dalam RIS yang statusnya sama dengan negara-negara ciptaan Belanda.

Pada tanggal 27 Desember 1949 di ibukota Belanda Amsterdam diadakan penyerahan kedaulatan dari Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana kepada Indonesia diwakili Drs Moh Hatta sebagai Ketua Delegasi RI, sedangkan di Jakarta pada hari sama dilakukan penyerahan kedaulatan itu dengan menurunkan bendera Belanda depan Istana Merdeka dan Bendera Sang Saka Merah Putih berkibar sebagai tanda kedaulatan Indonesia. Dalam upacara tersebut Belanda diwakili Wakil Mahkota Agung Lovink sedangkan Indonesia diwakili Sultan Hamangku Buwono IX.

Dengan acara tersebut RIS berdiri secara resmi, terdiri atas 16 negara bagian dengan Jakarta sebagai ibukota dan Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara.

Pendapat tentang RIS di kalangan pejuang kemerdekaan TNI

Di kalangan para pejuang kemerdekaan TNI ada rasa sedih bercampur marah bahwa perjuangan bangsa mewujudkan hasil yang jauh dari yang mereka inginkan.

Pertama mereka marah bahwa Republik Indonesia yang mereka bela dan perjuangkan hanya menjadi negara bagian dari RIS setingkat dengan negara buatan Belanda yang merupakan boneka kehendak Belanda. Dan bahwa negara Indonesia yang memperoleh kedaulatan itu masih berada di bawah Mahkota Belanda. Ditambah lagi penyerahan kedaulatan itu tidak meliputi Irian Barat, padahal yang dimufakati adalah penyerahan kedaulatan atas wilayah bekas Hindia Belanda yang jelas meliputi Irian Barat.

Kedua, mereka marah bahwa Indonesia harus menanggung semua hutang Hindia Belanda, padahal biaya itu sebagian besar digunakan untuk memerangi dan menghancurkan RI serta memusnahkan mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Berarti Indonesia membiayai kehancuran dan pemusnahannya sendiri, satu hal yang amat tidak ada logikanya. Apalagi setelah diketahui bahwa jumlah hutang itu sebesar 4,8 milyar gulden Belanda, satu jumlah uang yang ketika itu besar sekali.

Ketiga, mereka merasa gusar bahwa sekalipun TNI diakui sebagai Angkatan Perang RIS, tetapi harus menerima dan mengintegrasikan bekas anggota tentara Belanda (khususnya KNIL) yang tidak turut kembali ke Belanda., bekas musuhnya yang sering amat kejam kepada Rakyat dan anggota TNI yang tertawan. Apalagi kemudian mereka melihat bahwa bekas tentara Belanda itu mendapat kenaikan pangkat yang tidak masuk akal ketika bergabung dengan TNI. Seperti seorang sersan KNIL diberi pangkat letnan satu, seorang pembantu letnan menjadi kapten, seorang letnan menjadi mayor atau letnan kolonel.

Maka buat pejuang kemerdekaan KMB bukan satu konferensi yang berhasil bagi Indonesia, sekalipun terjadi penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada bangsa Indonesia. Mereka harus selalu mendapat penjelasan atau bujukan bahwa pemerintah RI, jadi termasuk Dwi Tunggal Bung Karno – Bung Hatta (malahan Bung Hatta yang memimpin delegasi RI di KMB), mau menerima hasil KMB karena yang paling penting bagi bangsa Indonesia adalah secepat mungkin diakui kemerdekaan dan kedaulatannya. Para pemimpin RI yakin bahwa setelah menjadi bangsa merdeka dan berdaulat, segala kekurangan akan dapat diatasi.

Sebenarnya sikap demikian pada para pemimpin yang berkuasa dalam pemerintah RI, yaitu sikap kompromis, memang berkembang sejak tahun 1945. Di antara pemimpin itu Bung Sutan Syahrir yang sejak akhir 1945 menjadi

Perdana Menteri RI pertama telah secara terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya belum siap untuk merdeka dan perlu lima tahun lagi untuk mencapai kemerdekaan yang betul, dan ini perlu dilakukan melalui bantuan Belanda. Tidak sekali saja Bung Syahrir menyatakan bahwa Indonesia masih memerlukan sekitar 5 tahun agar benar-benar bisa merdeka, termasuk depan mahasiswa di Jakarta.

Selain Bung Syahrir yang jelas sikapnya yang kompromistis adalah Bung Amir Syarifuddin yang menjadi menteri pertahanan dalam kabinet Syahrir pertama. Bung Amir sejak permulaan diketahui dekat hubungannya dengan Belanda. Bersama Bung Syahrir, Bung Amir memimpin Partai Sosialis yang berdiri setelah Indonesia merdeka. Maka ada hubungan dekat dengan pimpinan partai Belanda berhaluan sosialis, yaitu *Partij van de Arbeid* (PVDA) dan partai sosialis Inggris (*Labour Party*). Para pemimpin Partai Sosialis yakin bahwa atas dasar solidaritas sosialis kaum sosialis Belanda akan membantu Indonesia mewujudkan kemerdekaannya.

Sejak permulaan pendudukan Jepang ada persetujuan antara Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir dalam menghadapi Jepang. Mereka bertiga kuat bersatu dalam perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan berusaha memperoleh manfaat maksimal dari pendudukan Jepang. Dalam menghadapi Jepang Dwi Tunggal akan bekerja sama dengan Jepang untuk memperoleh hal terbaik bagi Indonesia dalam kekuasaan Jepang yang keras dan kejam. Sedangkan Bung Syahrir ditetapkan untuk bergerak bebas dari Jepang untuk liwat gerakan bawah tanah terus menyiapkan bangsa untuk merdeka. Di samping itu juga mengamankan Dwi Tunggal, khususnya pada saat Jepang kalah, untuk menghadapi berbagai tuduhan Belanda dan kalangan Sekutu bahwa Dwi Tunggal berkolaborasi dengan Jepang. Adalah karena intervensi Bung Karno pihak militer Jepang membatalkan keputusannya menghukum mati Bung Amir Syarifuddin yang

oleh kawan-kawannya sendiri dikhianati telah menerima dana dari Belanda untuk menyusun perlawanan terhadap Jepang.

Sebab itu sejak permulaan para pemimpin RI sama sikapnya dalam menyongsong kemerdekaan dan ini kemudian termasuk kesediaan untuk berunding dengan Inggris dan Belanda. Sikap dasar mereka adalah bahwa Sekutu telah menang perang dan karena itu kuat posisinya. Sedangkan bangsa Indonesia kurang kuat, juga untuk menghadapi Belanda dengan cara militer. Para pemimpin waktu itu melihat perlawanan militer dari segi konvensional belaka dan tidak memahami meningkatnya makna perlawanan gerilya atau non-konvensional. Karena bangsa Indonesia waktu itu kurang mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan militer konvensional, maka para pemimpin berpendapat bahwa usaha menyelamatkan kemerdekaan harus dengan cara perundingan.

Persetujuan Linggarjati

Sikap itu memudahkan usaha Lord Killearn dari Inggris untuk mengajak para pemimpin RI bertemu dengan pemimpin Belanda untuk merundingkan masa depan Indonesia. Usaha ini menghasilkan diadakannya Persetujuan Linggarjati pada 11 November 1946.

Persetujuan Linggarjati antara lain menghasilkan hal-hal yang sejak permulaan menunjukkan kesediaan para pemimpin RI untuk menerima berbagai hasil yang kemudian menjadi hasil KMB. Seperti pembentukan satu negara federal Republik Indonesia Serikat dengan RI sebagai negara bagian yang wilayahnya meliputi Jawa, Sumatra dan Madura saja. Juga bahwa RIS akan menjadi bagian Persemakmuran Belanda dengan dipimpin Mahkota Belanda.

Akan tetapi Belanda setelah tercapai Persetujuan Linggarjati melakukan Aksi Militer ke 1 pada tanggal 21 Juli 1947, karena Belanda menghadapi keadaan ekonomi yang makin mendesak sehingga perlu cepat menghidupkan

produksi di Indonesia dengan dikuasai Belanda. Bukan karena Belanda kurang cocok dengan hasil Persetujuan Linggarjati, melainkan merasa perlu cepat menguasai Indonesia. Nanti hal serupa terjadi ketika melakukan Aksi Militer 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Hal ini menunjukkan kesalahan pendapat para pemimpin kita bahwa Belanda akan tetap pada sikap berunding atau diplomasi saja. Selain itu kekuatan politik lain di Belanda di luar kalangan sosialisnya, terutama kalangan militernya, sejak semula tidak rela Indonesia merdeka. Buat mereka perundingan hanya bermanfaat untuk mengembalikan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda.

Akan tetapi juga di kalangan RI tidak semua pihak setuju dengan sikap kompromis itu. Yang jelas dan tegas tidak setuju adalah kalangan yang dekat dengan Tan Malaka yang membentuk Persatuan Perjuangan. Selain itu partai PNI dan Masyumi tidak setuju. Juga termasuk tidak setuju adalah Panglima Besar Sudirman yang berpendapat bahwa Belanda tak mungkin dapat dipercaya karena kepentingannya terlalu besar dan luas di Indonesia. Buat Pak Dirman kemerdekaan harus diperjuangkan dan tak mungkin mengharapakan kebaikan hati Belanda sebagai penjajah. Kemerdekaan bangsa tak dapat di-kompromis-kan. Sebab itu tidak jarang Pak Dirman menunjukkan sikap dekat kepada Persatuan Perjuangan dan Tan Malaka.

Itu sebabnya Pak Dirman pada tahun 1949 mula-mula tidak setuju diadakan KMB cepat-cepat, ketika perlawanan Rakyat bersama TNI memukul Belanda di banyak tempat dan menggagalkan Belanda mencapai Tujuan Politik dan Ekonominya. Sikap Pak Dirman juga dianut banyak kalangan TNI, sekalipun ada beberapa orang yang mendukung politik berunding dan kompromis yang dianut para pemimpin pemerintah RI. Bahwa Pak Dirman akhirnya memberikan persetujuan diadakan penghentian permusuhan segera untuk memungkinkan berlangsungnya KMB pada

tahun 1949, adalah semata-mata kesadaran beliau bahwa kepemimpinan Dwi Tunggal atas bangsa Indonesia mutlak diperlukan. Karena Bung Karno menyatakan bahwa beliau dan Bung Hatta tidak bersedia melanjutkan pimpinan tanpa dukungan Pak Dirman, maka itulah yang membuat Pak Dirman memberikan persetujuannya. Pak Dirman yakin bahwa bangsa Indonesia harus dipimpin Dwi Tunggal untuk dapat mencapai kemerdekaan.

Di sini kemudian lahir sikap TNI, yaitu bahwa TNI boleh kritis terhadap rencana dan gagasan pimpinan negara. Akan tetapi bila pimpinan negara menyatakan keputusannya maka TNI secara loyal mendukungnya dengan penuh kesungguh-sungguhan, sekalipun keputusan itu berbeda dengan yang dipikirkan dan diinginkan TNI.

Hasil KMB yang kurang menyenangkan itu juga terjadi karena AS sebagai pihak penengah lebih dekat kepada Belanda sebagai sekutunya dalam Perang Dunia 2 maupun NATO. Hasil itu membuktikan kebenaran pendapat Pak Dirman dan para pejuang kemerdekaan TNI yang kurang setuju dengan berunding saja. Maka setelah KMB tercapai menjadi kewajiban perjuangan bagaimana membuat hasil itu tidak merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Yang utama dan pertama diperlukan adalah bagaimana meniadakan eksistensi RIS dan konsepsi negara federal yang merupakan senjata Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Republik Indonesia harus diperjuangkan menjadi satu-satunya organisasi kenegaraan yang memegang kedaulatan di bumi Indonesia.

Berakhirnya Republik Indonesia Serikat

Baik lingkungan politik maupun TNI kemudian mengusahakan agar dapat diwujudkan kondisi yang memungkinkan RIS berakhir tanpa melanggar hasil KMB. Peran TNI pertama adalah usaha untuk mempengaruhi masyarakat di negara-negara bagian buatan Belanda. Sebab

itu secepat mungkin pasukan-pasukan TNI harus masuk wilayah negara boneka itu.

Belanda dan pimpinan negara boneka yang dekat kepada Belanda juga menyadari itu. Sebab itu mereka mengusahakan agar Hamid Algadri yang bekas perwira Belanda di KNIL, menjadi menteri pertahanan RIS. Sebaliknya kalangan RI memperjuangkan hal itu tidak terwujud dan mencalonkan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri pertahanan RIS. Akhirnya Belanda dan BFO tidak dapat mencegah Sultan HB IX yang diangkat menjadi menteri pertahanan RIS.



NKRI Kembali Berkuasa. Diunduh dari : (facebook.com)

Dengan Sri Sultan sebagai menteri pertahanan pimpinan TNI dengan cepat dapat menggerakkan pasukan-pasukan TNI dari wilayah RI masuk negara boneka. Dalam hal ini yang amat menentukan adalah wilayah Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. Sebab di NIT terdapat wilayah Manado dan Maluku yang sejak masa penjajahan amat kuat berpihak penjajah Belanda. Sedangkan di NST terdapat perkebunan-perkebunan yang menjadi incaran kekuasaan Belanda.

Dipindahkannya Kolonel Alex Kawilarang dari komando TNI di Sumatra menjadi panglima TNI di wilayah NIT (kemudian diberi nama Tentara &

Territorium VII atau TT 7) adalah satu tindakan strategis yang amat tepat dan berhasil. Dengan begitu Sulawesi Utara (Alex Kawilarang adalah putera Manado) tidak pernah menjadi persoalan bagi RI. Padahal dalam masa penjajahan Belanda sebelum PD 2 wilayah Manado sering disebut provinsi ke 12 Belanda (negara Belanda di Eropa Barat terdiri dari 11 provinsi). Juga dengan kepemimpinan Kawilarang semua perlawanan bekas KNIL di NIT, seperti pemberontakan Andi Azis dan Republik Maluku Selatan (RMS), dapat diatasi dengan sukses.

Usaha TNI di seluruh wilayah RIS difokuskan

kepada usaha territorial, yaitu mempengaruhi rakyat agar bergabung kepada Republik Indonesia. Pengaruh keberadaan pasukan TNI sebagai dukungan usaha territorial itu sangat penting, terutama sikap prajurit TNI yang dekat kepada Rakyat dan berbeda dengan sikap KNIL yang sebagai tentara penjajahan menindas atau sekurang-kurangnya menjauhi Rakyat.

Usaha territorial TNI makin lama makin menunjukkan hasil. Rakyat negara boneka dapat mendesak para pemimpinnya

yang menjadi anggota dewan perwakilan rakyat negara boneka itu. Makin banyak anggota DPR negara boneka bersuara agar negaranya bergabung kepada RI. Ketika terjadi keunggulan suara dalam DPR itu maka pimpinan negara boneka itu mau tidak mau harus menerima kehendak rakyat dan turut menyatakan kehendaknya agar negaranya bergabung dengan RI. Belanda dengan sangat mendongkol dan marah melihat proses itu, tetapi tidak dapat mengintervensi karena itu semua hasil dari proses demokrasi yang selalu oleh Belanda dijadikan ukuran kenegaraan.

Satu per satu negara bagian RIS menyatakan bergabung pada RI. Pada akhir Maret 1950 tinggal

ada 4 negara bagian dalam RIS, yaitu RI, Negara Kalimantan Barat, Negara Sumatra Barat dan Negara Indoonesia Timur. Dan pada akhir bulan April 1950 tinggal Republik Indonesia sebagai negara bagian. Dengan begitu secara *de facto* RIS sudah tidak ada dan RI satu-satunya negara di Indonesia. Maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan DPR dan Senat RIS menetapkan berakhirnya Republik Indonesia Serikat dan menandatangani piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia secara resmi terbentuk kembali sebagai Negara Kesatuan RI.

Dengan demikian sejarah RIS berakhir dan RI tegak kembali sebagai pemegang kedaulatan bangsa Indonesia tanpa terjadi pengeluaran satu tembakan pun. Seringkali kemudian ada ucapan lingkungan politik bahwa hal itu adalah jasa kaum politik. Memang kaum politik RI telah membuat berbagai usaha untuk mempengaruhi rekannya dari BFO. Akan tetapi itu semua sukar mencapai hasil seperti yang terjadi tanpa dukungan TNI. Sebab pada tahun 1950 tentara Belanda masih banyak yang

ada di Indonesia sebelum mereka dipulangkan ke Belanda. Mau tidak mau kehadiran kekuatan militer itu berpengaruh pada pikiran dan perasaan rakyat dan para pemimpinnya, khususnya yang duduk di DPR negara boneka. Maka nyata sekali peran TNI dalam perubahan yang amat sukses itu bagi perjuangan kemerdekaan bangsa. Sebab itu keberhasilan perjuangan kemerdekaan untuk mencapai kedaulatan bangsa dan negara adalah hasil kombinasi perjuangan politik-diplomasi dan perjuangan militer bangsa Indonesia. Bukan kemenangan politik saja atau militer saja.

Setelah itu langkah demi langkah dibatalkan hasil KMB secara keseluruhan. Dimulai dengan

pernyataan RI yang secara sepihak membatalkan hasil KMB pada tanggal 22 Mei 1956. Itu termasuk berakhirnya pembayaran hutang Hindia Belanda yang belum dibayar RIS. Dan terakhir adalah kembalinya Irian Barat ke wilayah nasional Republik Indonesia pada 15 Agustus 1962.

Dengan begitu bangsa Indonesia telah benar-benar berhasil mewujudkan kemerdekaannya. Namun karena kemerdekaan negara dan bangsa, betapa pun pentingnya bagi bangsa Indonesia, hanya merupakan jembatan untuk mencapai Tujuan Nasional, yaitu terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila,



NKRI Kembali Berkuasa. Diunduh dari : (facebook.com)

maka perjuangan belum selesai. Sekarang pun 65 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Tujuan Nasional itu masih jauh dari kenyataan. Pancasila masih belum menjadi kenyataan di Bumi Indonesia, Rakyat Indonesia masih diliputi banyak kemiskinan dan keadilan secara lahir maupun batin masih di awang-awang.

Sebab itu sekalipun Pejuang Kemerdekaan Indonesia sekarang sudah amat lanjut usia, baginya perjuangan belum selesai. Untuk Pejuang Kemerdekaan tidak ada akhir perjalanan dan perjuangan ! FOR A FIGHTING NATION THERE IS NO JOURNEY'S END.

DARI SIDANG UMUM VECONAC KE-13

OLEH DASMAN DJAMALUDDIN

Veconac/ Veterans Confederations of ASEAN Countries (Ikatan Veteran Se-Asia Tenggara) menyelenggarakan Sidang Umum Ke-13, 26-28 April 2010 di Jakarta. Untuk pertamakalinya hadir tamu khusus dari Timor Leste sebagai Pengamat.



ataupun Veteran dari seluruh dunia pada umumnya. Jika sudah menjadi sebuah ikatan, maka segala sesuatunya akan lebih terjamin dan terkoordinir.

Sidang umum Veconac kali ini dihadiri 10 delegasi dengan jumlah peserta 110 anggota dan untuk pertama kalinya hadir tamu khusus dari Timor Leste sebagai pengamat. Timor Leste adalah bekas provinsi ke-27 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sewaktu

SIDANG Umum Ke-13 Veconac digelar 26-28 April 2010 di Jakarta. Merupakan perhimpunan para Veteran se-Asia Tenggara. Dibentuk pada 19 Desember 1980. Berarti, Desember 2010 ini memasuki usia ke-30. Pembentukannya disponsori Indonesia di dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada 19 – 23 Desember 1980. Negara-Negara Anggota yang sekaligus penandatanganan berdirinya organisasi ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. Ketua (President) pertama dijabat Letjen (Pur) Achmad Tahir dari Indonesia (Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia/LVRI) dan selanjutnya dipergilirkan sesudah dua tahun di antara sesama negara anggota.

Tujuan didirikannya Veconac adalah untuk mempersatukan dan meningkatkan kerjasama antar organisasi Veteran Asia Tenggara dalam rangka mencapai dan meningkatkan perdamaian, kesejahteraan dan persatuan bagi kepentingan para Veteran, termasuk dalam hal ini para cacat Veteran, para korban perang, dari Asia Tenggara khususnya

bergabung dengan NKRI dikenal dengan istilah Timor Timur. Sejak Senin, 20 Mei 2002, tepat pukul 00.00, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menyerahkan kedaulatan dari tangan Indonesia kepada pemerintah Timor Leste yang memproklamasikan diri sebagai negara berdaulat. Timor Leste adalah kata lain untuk menyebut Timor Timur atau East Timor. Ada pula yang menyebut Timor Lorosae yang berarti tanah matahari terbit.

Veconac Mampu Tingkatkan Perdamaian

Sidang dibuka oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro. Dalam sambutannya, Menhan mengatakan, Veconac selama lebih dari 13 tahun merupakan salah satu organisasi yang terkenal dan sukses. Karena di samping telah berhasil mendukung program kerjasama, Veconac juga mampu meningkatkan semangat perdamaian di negara-negara ASEAN.

“Sangat jelas, sebagai seorang Veteran akan dapat memainkan peran strategis di dalam dinamika

suatu perkembangannya untuk dapat meningkatkan negara-negara ASEAN yang independen. Seorang Veteran yang menjalani sejarah dan masa depan akan dapat mengingatkan kepada generasi muda untuk melayani negara sebaik mungkin melalui visi dan misi yang mereka miliki. Bapak-bapak sebagai Veteran bisa memberikan dan berbagi pengalaman kepada generasi muda, sehingga mereka memiliki sifat bela negara,” jelas Menhan.

Bela negara, berarti bahwa setiap bangsa harus memahami sejarah negaranya masing-masing dan sebagai anak bangsa berkewajiban membela bangsa dan negaranya. Hanya dari para Veteran pejuang negara masing-masing, generasi mudanya bisa memahami betapa dalam hal membela negara diperlukan pengorbanan tanpa pamrih, baik harta maupun nyawa. Usaha para Veteran ini harus bisa menjadi contoh generasi mudanya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Dr R.M.Marty Natalegawa, juga memberikan sepatah dua kata pada pembukaan Sidang Umum Veconac ini. Menlu menganggap sejak berdiri tahun 1980, Veconac telah membangun jaringan bagi menciptakan kawasan stabil dan damai di Asia Tenggara. Veconac juga memainkan peranan penting bagi terciptanya solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara ASEAN.

Apa yang dijelaskan oleh Menlu tidak terlepas dari hasil pertemuan para anggota ASEAN di Bali tahun 2003. Pertemuan ini menghasilkan pemikiran-pemikiran lebih terkonsep dan lebih bervariasi ke depan. Awalnya negara-negara anggota ASEAN sepakat membentuk Masyarakat ASEAN pada tahun 2020 dan gagasan ini tertuang dalam Visi 2020 Bali Concord II.

Tidak lama kemudian, usul membentuk Masyarakat ASEAN mengalami perubahan, yaitu lebih dipercepat menjadi tahun 2015. Jalan ke arah itu pun telah dirintis melalui pengaturan penurunan tariff bersama yang mulai berlaku tahun 1993 dan penerapan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

(AFTA/ASEAN Free Trade Association tahun 2003).

Sudah tentu dengan berlakunya Piagam ASEAN sejak 15 Desember 2008, sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari pengintegrasian kawasan menuju Komunitas ASEAN pada 2015. Ini berarti target berlakunya Piagam ASEAN sangat jelas, yaitu ketika tahun 2015 tiba, masyarakat ASEAN harus sudah bisa merasakan berbagai kenikmatan dari integrasi di berbagai bidang.

Rais Abin President of Veconac

PADA saat Sidang Umum ini pula terjadi penyerahan estafet kepemimpinan dari *President of Veconac*, Kolonel (Purn) John Morrice dari Singapura kepada Letnan Jenderal (Purn) Rais Abin, Ketua Umum LVRI. Sebuah tantangan untuk menjembatani para veteran se-ASEAN di Era Globalisasi



Sebelumnya Rais Abin di dalam laporannya mengenai LVRI, mempertegas masalah regenerasi yang sudah dilakukannya sesaat terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI periode 2007-2012 dalam Kongres LVRI IX pada 26 – 28

Maret 2007 di Jakarta Baru pertama kali LVRI menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum secara langsung sejak Kongres I pada tanggal 22 Desember 1956 – 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta. Hal ini disesuaikan dengan tuntutan Era Reformasi

Rais Abin sebagai Ketua Umum LVRI sekaligus tuan rumah Sidang Umum ke-13, juga mencatat beberapa hal dari Veconac yang akan memasuki tahun ke-30 :

Indonesia sebagai tuan rumah merasa gembira bahwa para Veteran Kamboja telah memutuskan untuk bergabung dengan Veconac sebagai anggota penuh. Oleh karena itu Veconac akan semakin kuat.

Indonesia juga merasa senang akan kehadiran para pengamat dari Laos dan Myanmar. Indonesia berharap mereka akan menjadi anggota penuh

dalam waktu yang tidak lama.

Indonesia juga mengucapkan selamat datang kepada delegasi pengamat dari Timor Leste, di mana Organisasi Veterannya telah diizinkan menjadi anggota di dalam Kongres Federasi Veteran Dunia (WVF) di Kopenhagen tahun lalu.

Baru kali ini pula untuk pertama kalinya Sidang Umum Veconac dihadiri oleh seluruh organisasi Veteran ASEAN dan Timor Leste.

Dalam hal ini Indonesia telah berhasil memperluas keharmonian dan selalu mencari jalan agar lebih produktif.

Visi ASEAN sepenuhnya harus didukung para anggota Veconac yang tertuang dalam konstitusi masing-masing yaitu bagaimana menciptakan kawasan yang kita cintai menjadi aman dan stabil serta selalu memikirkan kesejahteraan bagi para Veteran.

Selanjutnya dalam hal menanggapi jalannya Sidang Umum Veconac ke-13 di Jakarta, Rais Abin mengatakan: "Seluruh sidang berjalan sangat lancar dan memuaskan. Merupakan refleksi dari harmoni, saling pengertian dan kedekatan antara para delegasi."

Teroris di Indonesia

MASALAH teroris di Indonesia juga dibahas Rais Abin dalam Sidang Umum Veconac ke-13 tersebut. Menurut Rais, hal ini perlu juga diketahui oleh peserta, agar mereka mengetahui sejauh mana keberhasilan Indonesia ikut serta menanggulangi aksi aksi teror di Indonesia.

"Sudah hampir lima tahun tidak ada lagi aksi-aksi teror di Indonesia," ujar Rais Abin, "yaitu sejak bom meledak di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta pada hari Jumat, 17 Juli 2009. Hal ini dikarenakan kesiapan operasi polisi Indonesia dalam menanggulangi masalah itu.

"Di antara empat orang yang tewas oleh serangan polisi pada 17 September 2009 terdapat salah seorang tokoh teroris Noordin Muhammad Top. Dari dokumen-dokumen dan laptopnya diketahui bahwa dia adalah pemimpin Al-Qaida di Asia Tenggara. Noordin (41), telah mulai dengan ide-ide yang radikal ketika masih bersekolah di Malaysia sekitar awal 1990-an dan terbang ke Indonesia pada tahun 2002 setelah terjadi peristiwa 11 September

2001 yang menyerang Amerika Serikat," jelas Rais Abin lanjut.

Rais Abin menjelaskan pula kematian Dulmatin pada 9 Maret 2010 di Pamulang sebelah selatan Tangerang oleh pasukan antiteror Indonesia."Dulmatin adalah pemain utama di balik serangan bom Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, sebagian besar adalah para wisatawan luar negeri. Dia lahir di Jawa Tengah tahun 1970. Dulmatin bekerja sama dengan jaringan-jaringan daerah bawah tanah dan kariernya dimuali sejak mengikuti latihan-latihan di Afghanistan kemudian bergabung dengan sesama rekannya, termasuk Joko Pitoyo, Joko Pitono, Abdul Matin dan Muktarmar. Ketika terjadi bom meledak di Hotel JW Marriot Jakarta bulan Agustus 2003, Dulmatin terbang ke selatan kepulauan Filipina, Mindanao, pusat para militan Islam yang lain di wilayah itu. Sebelumnya tahun 2008, para pejabat militer Filipina mengatakan bahwa mereka percaya menyaksikan mayat Dulmatin tergeletak di Kepulauan Tawi-Tawi sebelah selatan Filipina," urai Rais Abin

"Meskipun ancaman teroris masih ada di Indonesia, dengan telah tewasnya Noordin M.Top dan Dulmatin, orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan warga tak berdosa, tetapi dengan kesiapan keamanan, ancaman tersebut tidak akan berarti apa-apa," tegas Rais Abin.

Sebelum Sidang Umum Veconac dibuka, dalam hal memperkuat solidaritas di antara para Veteran ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan empat pesannya, yaitu:

- Menekankan masalah perdamaian dan keamanan (*peace and security*). Dalam hal ini dibutuhkan adanya nilai-nilai kebersamaan antar negara ASEAN (ASEAN's Way). Kebersamaan ini bisa tercapai jika suatu karakteristik atau keunggulan bangsa-bangsa di ASEAN diperhatikan.

- Menekankan hubungan berbangsa antara satu dengan yang lain (*people to people contacts*). Kongritnya hubungan antar pemerintah (*government to government relations*) bisa berkembang, bahkan bisa dikembangkan ke *parliament to parliament relations* atau *business to business relations*.

- Keberadaan Timor Leste dan Papua Nugini dalam Sidang Umum ini akan mampu mempererat



Para peserta Veconac

hubungan antar sesama anggota ASEAN.

- Mengharapkan agar di dalam negara-negara ASEAN (komunitas ASEAN) mewujudkan suatu peradaban (*civilization*) atau harmoni yang saling menghormati guna mencapai masyarakat damai, adil dan sejahtera yang tetap menjadi prioritas penting.

ASEAN dan Veteran ASEAN

Sejarah memang mencatat, perjuangan para Veteran ASEAN di dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya sangat terbantu dengan berdirinya organisasi ASEAN itu sendiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada dasarnya, setelah Perang Dingin berakhir, peluang memperluas kerja sama semakin besar. Terciptanya kawasan stabil dan aman sebagaimana cita-cita ASEAN akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih terarah. Bergabungnya negara-negara Asia Tenggara diilhami dan dipersatukan dalam satu visi, satu identitas dan satu komunitas.

Baru-baru ini ASEAN telah pula menjadi subyek hukum internasional. Menurut Hukum Internasional, subyek hukum adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban. Ada beberapa subyek hukum dalam Hukum Internasional, yaitu Negara, Takhta Suci, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Orang Perorangan (individu), Pemberontak dan Pihak dalam sengketa (*belligerent*).

Oleh karena ASEAN mendefinisikan dirinya sebagai organisasi antar-pemerintah, maka subyek hukum internasional yang dipakai adalah Negara. Dulu sewaktu awal berdirinya, 8 Agustus 1967 di Bangkok hanya diawali dengan Deklarasi, tanpa Piagam atau tanpa Anggaran Dasar. Sekarang sejak 15 Desember 2008, ASEAN memiliki Piagam. Dulu, negara-negara anggotanya hanya Indonesia, Malaysia, Republik Singapura, Republik Filipina dan Kerajaan Thailand. Selanjutnya ada lima negara lagi yang bergabung, yaitu Brunei Darussalam (bergabung tahun 1984), Republik Sosialis Vietnam (bergabung tahun 1995), Republik Rakyat Demokratik Laos (bergabung tahun 1997), Uni Myanmar (bergabung tahun 1997), dan Kerajaan Kamboja (bergabung tahun 1999).

“Dengan hadirnya keseluruhan anggota ASEAN di dalam Sidang Umum ke-13 Veconac di Jakarta, diharapkan seluruh mereka pun mau secepatnya bergabung dalam Veconac,” ujar Rais Abin yang sejak sidang itu menjadi *President of Veconac*.

Sejak 15 Desember 2008, Piagam ASEAN telah mengikat anggotanya. Sekarang anggota ASEAN semakin berkembang dan terdiri dari 10 negara di mana keseluruhan anggota ASEAN ini untuk pertama kalinya hadir secara keseluruhan dalam Sidang Umum ke-13 Veconac di Jakarta, baik yang sudah berstatus anggota penuh maupun masih sebatas pengamat di dalam Veconac.

OBROLAN MASALAH ESB

(Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Sistem Ekonomi Konstitusi

Sekarang ini banyak rakyat bingung, sudah merdeka sekian puluh tahun tetapi nasib kok belum berubah, karena masih tetap saja tergolong rakyat dari negara yang miskin. Di dalam negeri ekonomi dikuasai oleh satu golongan kecil pengusaha besar, sedang di luar negeri Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri yang besar.

Para pakar ekonomi mulai berdebat bahwa untuk keluar dari jeratan "*Washington Consensus*", kita harus kembali ke ekonomi Konstitusi. Namun Konstitusi yang mana, Konstitusi 1945 atau Konstitusi 2002? Kedua-duanya mempunyai pasal 33, tetapi yang pertama judulnya "Kesejahteraan Sosial" sedangkan yang kedua "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial". Yang pertama jelas ekonomi untuk rakyat, tetapi yang kedua mengutamakan ekonomi nasional atau ekonomi untuk para pengusaha besar. Yang pertama ekonomi rakyat, yang kedua ekonomi neo-kapitalisme dan neo-liberalisme

Kita harus mulai mengembangkan sistem ekonomi yang tetap memberikan peranan pengendalian oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan rakyat dan membatasi kekuasaan pasar serta secara bertahap membawa rakyat untuk menjadi tuan di rumah sendiri. Termasuk kepentingan rakyat adalah melarang menyimpan devisa hasil ekspor di bank-bank luar negeri tetapi harus di dalam negeri, agar dapat dimanfaatkan untuk memajukan pertanian rakyat.

Garis-Garis Besar Haluan Negara

Saat ini di negara yang besar ini banyak yang tidak tahu ke mana arah ekonomi kita. Para pejabat pemerintah tidak tahu, para wakil rakyat tidak tahu, apalagi rakyat. Ada RPJM, ada RPJP, tetapi bahkan yang tanda tangan tidak tahu apa isinya dan dalam kenyataan banyak programnya tidak

dilaksanakan. Bahkan APBN tahunan yang terus di ubah-ubah tidak mencerminkan RPJM, karena hanya merupakan daftar keinginan-keinginan para menteri dan para wakil rakyat sesaat..

Rakyat merindukan kembali adanya GBHN yang disusun bersama secara terbuka oleh para wakil rakyat, utusan daerah dan golongan, sehingga merangkum semua keinginan rakyat, dalam sebuah majelis permusyawaratan yang melibatkan seluruh bangsa. GBHN harus memuat harapan, keinginan, pandangan dan cita-cita seluruh rakyat, sedangkan RPJM dan RPJP adalah janji-janji seorang pemenang pemilihan presiden. Hal yang perlu ditambahkan adalah adanya *roadmap* pelaksanaan GBHN, yang memungkinkan terjadinya pembiayaan *multi-years* dalam APBN.

Sebenarnya rakyat juga sangat merindukan kembali adanya MPR yang berwenang membuat GBHN dan lebih dari itu meluruskan Konstitusi 2002, melalui peninjauan kembali keempat amandemennya. Bahwa yang akan diubah hanyalah hal-hal yang esensial saja, seperti presiden dipilih secara langsung dan dibatasi untuk dua periode, serta bentuk perubahan adalah Adendum, sehingga seluruh bentuk Konstitusi 1945 yang asli tidak berubah dan tetap ada di samping dokumen-dokumen Adendum. Rakyat sekaligus diajari untuk menghargai sejarah bangsanya.

Badan Logistik Nasional

Sudah sejak bulan Mei 2010 harga-harga bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari merangkak naik dan membuat banyak ibu rumah tangga menjerit. Mengapa beras, gula, minyak goreng, ayam potong, telur dan lain-lain bisa terus naik? Padahal Indonesia adalah negara yang kesuburan alamnya mampu mencukupi semua kebutuhan rumah tangga itu.

Dibutuhkan adanya badan pemerintah yang berfungsi sebagai badan penyedia stock dan

pemelihara stabilitas harga di semua pelosok tanah air, seperti BULOG jaman dulu, bukan BULOG yang sekarang.

BULOG atau DOLOG harus ada di setiap propinsi, tugasnya bukan mencari untung tetapi menjaga stock dan stabilitas harga barang-barang pokok kebutuhan hidup rakyat sehari-hari. Mengapa badan-badan pemerintah yang telah teruji manfaatnya harus dirombak dengan mengorbankan kepentingan rakyat ?

Di samping itu produktivitas para petani kitapun perlu ditingkatkan. Mengingat para petani itu sebagian besar berpendidikan rendah maka Pemerintah perlu menghidupkan kembali adanya penyuluh pertanian lapangan dengan membuka bea siswa Akademi Pertanian untuk ditempatkan di tiap kecamatan.

Sistem Pendidikan Nasional

Setiap akhir tahun bangsa ini digelisahkan oleh ujian akhir nasional untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Yang terbayang bukan hasil lulus dengan nilai baik sebagai tanda keberhasilan setelah belajar keras selama sekian tahun, tetapi ketidaklulusan. Maka banyak murid, orangtua dan bahkan guru menuntut agar ujian akhir nasional dihapus. Mengapa bangsa ini menjadi bangsa pengecut ? Mengapa selalu berpikir negatif dan tidak positif ? Di mana semangat perjuangan yang pantang menyerah seperti semangat para kakek – neneknya di tahun 1945 ?

Juga alasan bahwa kualitas pendidikan di daerah dan tempat-tempat terpencil tidak bisa dibandingkan dengan yang di pusat dan kota-kota besar, bukan alasan yang tepat, karena ijazah SD/SMP/SMA/SMK dari manapun asalnya harus sama derajatnya. Seperti misalnya lulusan kedokteran di Medan, Jakarta, Surabaya, Makasar dan kota-kota yang lain harus sama kualitasnya, sebab salah obat bisa membahayakan nyawa pasien.

Sejak WTO memasukkan pendidikan ke dalam daftar komoditi untuk perdagangan bebas, maka banyak lembaga pendidikan asing masuk

ke Indonesia. Keadaan ini membuat pemerintah lupa akan tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang harus disediakan oleh pemerintah. Pemerintah justeru ingin bersaing dengan fasilitas sekolah-sekolah asing yang mewah, seperti AC untuk setiap kelas. Maka ditetapkan sekolah-sekolah standar nasional dan sekolah-sekolah RSBI dan SBI dengan membedakan uang sekolahnya, karena fasilitas gedungnya berbeda, padahal materi pelajarannya mestinya sama. Apakah hukum Archimedes atau hukum Phytagoras misalnya akan berbeda di kelas berdinding bambu dengan kelas ber-AC ? Adanya sekolah-sekolah standar desa, standar nasional, standar RSBI dan SBI bukan akan menghasilkan murid-murid cerdas, tetapi diskriminasi anak bangsa ! Yang kelak terjadi adalah masyarakat berkasta dengan jurang pemisah yang lebar, yang jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa ! Maka semuanya harus dikembalikan ke satu standar, yaitu standar nasional dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Rote !

Sebuah SMA Negeri dipinggir kota Jakarta menarik sumbangan Rp.5 juta dari setiap siswa baru. Apakah ini bukan merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa kita ?

Negara Konstitusi

Indonesia adalah negara yang memiliki Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 segenap warga negara wajib menghormati dan mentaati seluruh isi UUD 1945, termasuk didalamnya dasar negara Pancasila, bendera kebangsaan Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu kalau ada warga negara Indonesia yang tidak mengakui Pancasila, tidak mau menghormati bendera Merah Putih atau tidak mau berdiri sebagai tanda hormat pada waktu lagu Indonesia Raya diperdengarkan, jelas telah melakukan penghinaan terhadap Konstitusi dan Lambang Negara Indonesia. Seharusnya mereka itu ditindak, karena untuk Merah Putih para Veteran telah mempertahankan jiwa dan raganya.

JAGA GARDU

PERJUANGAN RAKYAT ACEH MEMBELA NKRI

OLEH A.AZIZ M

“Aceh adalah modal utama bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Aceh berperan dalam kepemilikan pesawat terbang pertama Indonesia, Dakota. Saya menjanjikan status ‘istimewa’ jika kelak Indonesia Merdeka”

Pidato Soekarno 17 Juni 1945

Menjelang kemerdekaan, pada tanggal 17 Juni 1945, Soekarno berpidato di hadapan rakyat Aceh untuk mengucapkan terimakasih atas nama Bangsa Indonesia, karena rakyat Aceh berperan dalam kepemilikan pesawat pertama bangsa Indonesia. Pidato itu berlangsung di Lapangan Blang Padang, Kutaraja, yang sekarang bernama Banda Aceh. Inilah pesawat terbang pertama bangsa Indonesia, sebuah pesawat Dakota, sumbangan rakyat Aceh.

Sudah tentu pemberian pesawat terbang ini memberikan semangat dan dorongan kepada para pejuang kita untuk segera merdeka. Dalam arti kata tidak terus dinabobokkan dengan janji-janji pemerintah Jepang yang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno yang pada waktu itu belum secara resmi menjabat Presiden Republik Indonesia, sangat gembira. Bahkan dia menjanjikan status “istimewa” untuk Aceh jika kelak Indonesia merdeka.

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tetapi janji Soekarno yang pernah diucapkannya untuk memberikan daerah “istimewa” kepada Aceh, sepertinya setengah hati. Menjelang akhir kepemimpinannya, tahun 1966, Soekarno tidak pernah memberikan status “istimewa” secara de jure. Berbeda dengan pemberian status “istimewa” kepada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, yang kedua-dua daerah itu status “istimewa” nya diundangkan.

Namun demikian, rakyat Aceh masih tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Buktinya, meskipun pada 4 Desember 1976 lahir apa yang dinamakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hal itu tidak sampai berlarut-larut karena pada 15 Agustus 2005 dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) di

Helsinki, GAM kembali ke pangkuan NKRI.

Ketika saya mengunjungi Aceh pertengahan Juni 2010, saya berdecak kagum dengan keheroikan rakyat Aceh. Saya sempat mengunjungi apa yang dinamakan “Monumen Radio Rimba Raya,” yang berlokasi di Desa Ronga-ronga, sekitar 40 km sebelum Kota Takengon. Jadi dengan menyaksikan monumen ini, saya berkesimpulan bahwa rakyat Aceh tidak henti-hentinya memberi sumbangsih terhadap perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Kita pun semakin tahu dan memahami bahwa perjuangan rakyat Aceh tidak hanya sekedar menyumbangkan pesawat Dakota, tetapi sangat berperan pula di saat-saat Indonesia dalam kritis yaitu melanjutkan komunikasi ke seluruh dunia melalui Radio Rimba Raya pada tanggal 20 Desember 1948.

Seperti kita ketahui, pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda kembali menyerang tanah air Indonesia. Serangan yang dikenal dengan “Agresi Belanda Kedua” itu datang tiba-tiba dan sangat melelahkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena sebelumnya, September 1948 baru saja menghadapi pengkhianatan bangsa sendiri dalam gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Muso yang mendalangi peristiwa (kudeta) Madiun. Ini merupakan saat-saat terberat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Serangan besar-besaran Belanda sudah tentu ditujukan ke Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta. Mengapa Yogyakarta? Sebelumnya ibukotanegara memang dipindahkan ke Yogyakarta, karena wilayah kekuasaan RI semakin sempit berdasarkan Persetujuan Renville. Persetujuan ini menjadi dilema bagi pemerintahan Indonesia, karena pada satu sisi memang telah terjadi gencatan senjata akibat Agresi Belanda Pertama, 21 Juli 1947, tetapi pada sisi lain pelaksanaan Persetujuan Renville

terpaksa dilaksanakan dengan berat hati. Dari kesepakatan itu sekitar 30.000 tentara kita dari Jawa Barat (Siliwangi/tidak termasuk Banten) dan Jawa Timur (unsur-unsur Divisi Brawijaya) harus hijrah ke daerah pedalaman. Belanda menganggap daerah-daerah yang kota-kotanya diduduki oleh tentara Belanda sejak 21 Juli 1947 merupakan daerah pendudukan Belanda. Mereka menuntut agar gerilya TNI ditarik dari daerah-daerah yang mereka duduki ke daerah yang masih belum diserang oleh Belanda. Begitu pula ibu kota negara kita yang di Jakarta untuk sementara pindah ke Yogyakarta.

Serangan itu menyebabkan Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta dikuasai Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta sejumlah menteri yang berada di Ibu Kota Yogyakarta ditangkap. Belanda menganggap Republik sudah tamat riwayatnya. Sementara itu Radio Republik Indonesia (RRI) yang mengumandangkan suara Indonesia Merdeka ke seluruh dunia, berhenti pula mengudara. Suara-suara sumbang ini diperkuat Radio Belanda Hilversum, yang secara lantang menyiarkan bahwa Republik Indonesia sudah hancur. Bahkan sebagian dunia mempercayai berita itu.

Pada saat-saat genting inilah Aceh berperan. Pada waktu itu juga, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dalam Sidang Dewan Pertahanan Daerah memutuskan pada tanggal 20 Desember 1948, sebuah pemancar Radio yang kemudian dinamakan **Radio Rimba Raya** harus telah mengudara. Pemancarnya yang kuat itu sengaja didatangkan dari luar negeri, sehingga pada tanggal 20 Desember 1948 mala, Radio Rimba Raya mengudara menembus angkasa memberitakan bahwa Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila masih ada dan Revolusi 1945 masih tetap menyala.



Kapal Kandas di tengah kota Banda Aceh

Setelah melihat Monumen Radio Rimba Raya, saya sempat pula menyaksikan peninggalan kedahsyatan terjangan tsunami akhir tahun 2004. Sebuah kapal PLN yang kandas di tengah kota Banda Aceh (sekitar 4 km) dari Pantai Ulele, dibiarkan menjadi monumen sejarah dan dapat disaksikan sebagai tempat wisata. Untuk mengenang jalannya pergerakan gelombang tsunami dan korban rakyat yang meninggal dunia dengan bentuk dan kondisi yang mengesankan, dapat dilihat dalam Gedung Museum Tsunami, yang belum lama ini dibangun Pemerintah Daerah Aceh di tengah-tengah Kota Banda Aceh dan telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bencana tsunami di Naggroe Aceh Darussalam yang menelan korban hingga sekitar 310.000 jiwa, termasuk korban-korban di negara lain, kini berada di urutan teratas tsunami paling dahsyat karena korban jiwa begitu banyak. Pada 26 Desember 2004, terjangan tsunami menyeruak hingga ke berbagai negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti India, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Myanmar, Somalia di Afrika dan sejumlah negara lainnya. Bencana tersebut dipicu gempa bumi berkekuatan 8,9 skala Richter yang pusatnya berada di Samudera Hindia, sebelah barat kota Meulaboh.

SILATURAHIM KE CIAMIS DAN PESISIR SELATAN

OLEH ABU HUSEIN

Jauh Dijugjug Anggang Diteang

Silaturahmi bukanlah hal baru dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan budaya dan Kaidah agama mengajarkan untuk banyak bersilaturahmi dan selalu menasehatkan agar tidak memutuskan tali silaturahmi.

Pesan-pesan itulah yang kemudian mendorong saya bersilaturahmi ke Ciamis dan Pesisir Selatan baru-baru ini. Meskipun jarak yang ditempuh antara Jakarta – Ciamis – Pesisir Selatan menghabiskan waktu sekitar 9 – 10 jam, tetapi kalau didasari keikhlasan dan kerinduan untuk bersilaturahmi, maka jauhnya jarak bukanlah menjadi penghalang. Saya mengunjungi para Veteran di Pesisir Selatan sepanjang pantai Pangandaran, Parigi, Cijulang dan Cimera, untuk melihat dari dekat kehidupan mereka di wilayah itu.

Panorama hijau tetumbuhan sepanjang route mampu juga mengurangi kelelahan panjang perjalanan. Jalannya naik turun, berliku dan banyak belokan tajam. Pukul 16.00 WIB ketika tiba di pinggiran Pangandaran, sempat terhenyak melihat bahan bakar sudah hampir kosong. Berputar-putar mencari SPBU, tetapi stocknya sudah kehabisan. Kata petugasnya pengisian BBM dari tanker akan dilaksanakan nanti malam.

Kuncup juga nyali ini, seandainya tanker isi ulang tidak datang nanti malam. Berarti harus mengisi BBM di kios BBM pinggir jalan dengan harga Rp. 500,- per liter beda Rp. 50,- dengan harga SPBU.

Segera saja saya cari penginapan yang terjangkau kantong dengan sisa BBM yang hampir kosong. Akhirnya dapat juga penginapan tetapi tidak bebas dari nyamuk dan lalat. Mungkin karena di daerah pantai, nyamuk dan lalat itu terbiasa berkeliaran.

Kelelahan terobati setelah selanjoran dan tertidur. Bangun pagi, rampung shalat subuh

langsung jalan santai sepanjang pantai. Selesai jalan, sudah ditunggu kerumunan bakul nasi kuning dan jajanan pasar yang bergerombol menyambangi tamu penginapan yang memerlukan. Sarapan nasi kuning dan lain-lain memadai untuk menutupi kebutuhan karbohidrat dan protein sederhana. Botol aqua disediakan di kendaraan untuk bekal ulang dalam perjalanan.

Sasaran pertama adalah Koramil Pangandaran untuk melapor kehadiran dan silaturahmi dengan staf Koramil serta mohon bantuan panduan bersilaturahmi dengan para Veteran, sekaligus mengambil foto bersama dengan para Babinsa (Bintara Pembina Desa) di depan kantor mereka dan foto kantor Veteran Ranting Pangandaran serta kantor Primkoverinya. Patut disyukuri dan berterima kasih kepada seluruh anggota Koramil Pangandaran yang berani tampil bersahabat, walaupun kedatangan tamu tidak diundang dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pada umumnya, mereka siap memberikan informasi yang diperlukan sekitar kehidupan organisasi dan awak organisasi Veteran Ranting Pangandaran. Termasuk cerita tentang pemanfaatan biji jarak pagar. Jawaban mereka seragam bahwa di wilayah binaan Babinsa masing-masing belum ada pemanfaatan biji jarak untuk konsumsi dapur sederhana pengganti kayu bakar atau kompor minyak tanah. Yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sabut kelapa yang melimpah sebagai limbah kelapa yang dikeringkan atau dijual basah ke pasar tradisional di wilayah dan keluar wilayah mereka.

Berbekal informasi sementara ini, perjalanan survei dilanjutkan menuju Parigi, dengan terlebih dahulu bekal ulang BBM full tank. Saat berangkat dari Jakarta sudah diisi 40 liter dan habis dilumat route Jakarta – Ciamis.

Ternyata Koramil Parigi sudah mendapat telepon informasi dari Koramil Pangandaran tentang kedatangan tamu tidak diundang yang ternyata mereka juga sudah siap memberikan bantuan dan panduan. Selain itu siap pula dengan kendaraan “pribadi” roda dua untuk mengawal tamunya. Dengan pertimbangan keselamatan dan kenyamanan, kami bergabung bersama dalam kendaraan Roda Empat menuju sasaran. Kendaraan roda dua dititipkan di Kantor Koramil Cijulang.

Sepanjang perjalanan, kami becanda rilex dengan Serma Sarifudin yang baru 15 hari selesai operasi katarak. Sempat bikin kaget dan kagum karena dalam kondisi harus istirahat masih berani tampil sebagai pemandu sekaligus sebagai sumber keterangan “Dia bilang di Teritorial tidak ada hari libur Pak!, dan siaga 24 jam”.

Dialog tentang Veteran

Kantor Veteran Ranting Parigi dan Primkoverinya menjadi sasaran bidik lensa untuk diabadikan, pada lintas route menuju Ketua Ranting Veteran di desa CIJOHO kecamatan Parigi. Dan ternyata bahwa pada saat itu Bapak Mahri sebagai Ketua Ranting tidak ada di rumah, sedang bepergian ke Pangandaran. Menantu puteri Pak Mahri menerima tamu ditoko serba ada miliknya dan untuk ukuran desa cukup lengkap. Dia berupaya mengontak bapak mertua dengan HP dan tidak berapa lama kemudian Pak Mahri tiba di rumah. Kami ngariung dirumah Bapak Mahri yang terletak di samping belakang toko serba ada, kepunyaan menantu puteri. Pembicaraan dimulai dengan bahasa Sunda : *“Pangapunten ngaganggu, tumorojog tanpa larapan. Teu gugur teu angin ujug ujug jebul. Sok sananos nogencang teu cacandakan”* (Mohon maaf mengganggu, berkunjung tanpa mengabari terlebih dahulu. Dengan tangan kosong, tanpa membawa oleh-oleh).

“Singkuring ngawakilan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI sareng rengrenganana. Jauh dijugjug anggang diteang, seja ngahaturkeun silaturahmi bakat ku reueus hoyong patepung lawung paamprok jongok jeung parakanca Veteran tipakidulan, wewengkon tatar Parahyangan” (Saya mewakili Ketua Umum DPP

LVRI beserta staf untuk bertatap muka, temu wicara menghaturkan salam silaturahmi kepada segenap sahabat yang bermukim di pantai selatan Parahyangan).

Selanjutnya Pak Mahri menimpali : *“Hatur nubun kana kasumpinganna, estuning ngaraos bungah taya papadana, kersa rurumpabeun ka kampung. Panganpunten benteu tiasa nampinadasakieu buktosna.* (Terima kasih atas kunjungannya, merasa amat sangat suka-senang berkenan datang ke kampung, dan mohon maaf karena tidak selesa menerimanya).

Kemudian, Pak Mahri berbincang tentang organisasi LVRI, Primkoveri dan anggotanya yang relatif sejahtera, 85% sudah menerima DKV. Ketika bicara seputar pemanfaatan “jarak pagar”, beliau mengatakan bahwa hingga kini masih tetap dipelihara di kebun dan halaman sekitar rumah serta sepanjang pematang sawah terutama di Cisaga, sebatas melestarikan bibit agar dapat dimanfaatkan bila ada program penanaman jarak pagar seperti yang pernah terjadi pada tahun 2005. Tapi kemudian tidak tuntas karena para pemodal batal menampung hasil panen masyarakat. Mereka tidak faham apa masalahnya, kenapa bisa terjadi “Wan Prestasi”/ingkar janji dari pemodal sebelumnya yang telah bersepakat (*deal*) untuk bersama-sama masyarakat mengupayakan bahan baku *“biodiesel”* sebagai bahan bakar alternatif.

Meskipun demikian, Pak Mahri tidak nampak kecewa. Tetap tampil sangat bijaksana untuk mengendalikan rasa dihadapan lawan bicara. Obrolan diselingi dengan mengutarakan keberhasilan Pak Mahri dalam mengendalikan keluarganya pribadi dan putera puterinya yang telah mandiri. Puteranya yang keempat menjabat sebagai salah satu Direktur Bank Tabungan Negara di Jakarta. Dan seorang lagi menjadi karyawan kapal pesiar Amerika. Membanggakan. Yang kita kehendaki seluruh warga Veteran mengenyam kesejahteraan lahir bathin seperti Pak Mahri. Namun sayang sebagian terbesar para Veteran Pejuang Kemerdekaan tidak senasib baik seperti Pak Mahri, masih terlampau banyak yang perlu dipedulikan.

Mari kita lihat sasaran berikutnya, mampir dulu ke Koramil Cijulang untuk menyertakan

Serma Suparman dari Koramil Cijulang menuju kantor Veteran Ranting Cimerak. Tukar informasi menjadi lebih sempurna karena ada Serma Suparman disamping Serma Sarifudin yang menyertai safari ini sejak dari Parigi. Ketika tiba di kantor Ranting Veteran Cimerak sudah menunggu seorang ibu janda Veteran, Ibu Suhaedah janda dari almarhum Bapak Haji Zahiri yang telah wafat pada tahun 2008. Almarhum Bapak Haji Zahiri sebagai Ketua Ranting Cimerak digantikan oleh Bapak Kasmidi yang semula wakil ketua. Panjang ceritanya ibu Suhaedah tentang upaya mendaftar sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan beserta suaminya pada tahun 1991. Tidak terlalu lama menanti dalam tempo 6 bulan dari saat mendaftar, sudah mendapat SKEP Piagam Kehormatan Veteran RI dan SKEP Tunjangan Veterannya. Saat

ini ibu Suhaedah menerima Tuvet Janda sekitar Rp. 700.000,- yang bermanfaat untuk membiayai sekolah kedua puterinya. Yang sulung sudah lulus D-3 kebidanan dan sedang mencari pekerjaan, puterinya yang kedua sedang dalam proses masuk universitas Galuh Ciamis jurusan bahasa Inggris, semoga lancar dan berhasil.

Bapak Samidi, sebagai pengganti Ketua Ranting Cimerak, ditemui dirumahnya yang agak jauh dari kantor. Rumahnya kecil mungil semi permanen, yang menurut pak Samidi akan segera direhab bila sudah ada dana. Setiap bulan menerima Tuvet sekitar Rp. 1.131.000,- yang dapat menopang kebutuhan hidup keluarganya. Puteranya yang sulung berwira usaha dan bercocok tanam sekitar rumah

Surat Sekretaris Yayasan Supersemar

Nomor : SET.1520/YS/BB/07/2010

15 Juli 2010

Perihal : Permohonan Beasiswa Bagi Cucu Veteran

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP LVRI
Markas Besar Legiun Veteran RI
GEDUNG VETERAN RI "GRAHA PURNA YUDHA"
Lantai XI - Jln.Jendral Sudirman Kav.50
Jakarta 12930

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : D-558/MBLV/IX/06/2010, tanggal 23 Juni 2010 perihal Permohonan Beasiswa Bagi Cucu Veteran, bersama ini kami sampaikan bahwa Yayasan Supersemar pada prinsipnya menyetujui permohonan beasiswa bagi cucu Veteran.

Permohonan khusus serupa juga pernah disampaikan oleh LVRI kepada Alm.Bapak HM Soeharto (waktu itu sebagai Ketua Yayasan Supersemar) dan beliau berkenan menyetujui

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

A.n Ketua Yayasan Supersemar
Sekretaris

Abdul Rachman

JALAN MENUJU PUNCAK

OLEH WAHYONO S.K

MENDAKI gunung adalah perjalanan melelahkan, tetapi menyenangkan. Perjalanan itu penuh tantangan alam, namun apabila tidak waspada dan hati-hati, dapat pula mencelakakan diri. Jika seseorang berhasil mencapai ketinggian tertentu, maka cakrawala pandangan matanya bertambah luas dan bertambah indah. Semakin tinggi, semakin luas dan semakin indah. Ketika sampai di puncak, cakrawala pandangan mata tidak hanya semakin luas, tetapi juga semakin jauh dan tiba-tiba seluruh alam semesta terhampar di hadapannya, indah dan menakjubkan. Tidak satu pun yang menghalangi, betul-betul 360 derajat tanpa penghalang.

Teori Maslov

SETIAP manusia sudah tentu berkeinginan mencapai puncak. Keinginan menimbulkan dorongan kebutuhan yang kemudian menjadi motivasi manusia untuk mendaki ke puncak karier. Seiring dengan tingkat pendakiannya kebutuhan itu pun meningkat. Abraham H. Maslov menamakannya *hierarchy of needs*.

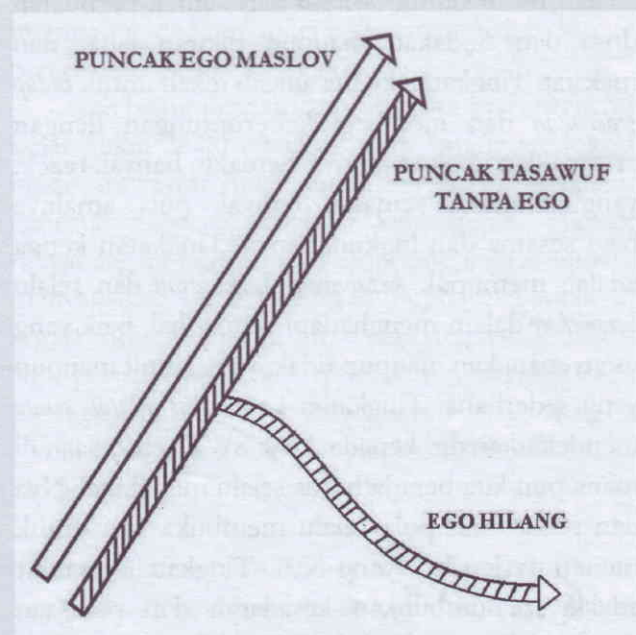
Kebutuhan itu semakin lama semakin meningkat. Mulai dari kebutuhan fisik, seperti pangan, sandang, papan, hingga meningkat ke kebutuhan non fisik, seperti keamanan untuk bebas dari rasa takut terhadap ancaman fisik maupun non fisik, lalu meningkat ke kebutuhan untuk mendapatkan hubungan sosial, karena manusia adalah makhluk sosial. Meningkatkan lagi ke kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan di lingkungannya. Puncaknya adalah kebutuhan untuk dapat mengembangkan diri secara maksimal.

Menurut Clare W.Graves, pada setiap tingkatan yang dicapainya, manusia menunjukkan perilaku dan nilai-nilai karakter dari kebanyakan manusia pada tingkatan tersebut, bahkan manusia pada tingkatan yang lebih rendah tidak dapat memahami karakter manusia pada tingkatan lebih tinggi. Tingkatan-

tingkatan itu kemudian membawa perubahan pada pola pikir, sikap mental dan perilaku. Tingkatan seseorang membentuk karakter orang itu.

Teori Tasawuf

BANYAK manusia telah berhasil mendaki puncak yang tertinggi. Tetapi nyatanya, keberhasilan mencapai puncak tidak selalu menghasilkan sosok manusia berkarakter, berpola pikir, bersikap mental dan berperilaku sebagaimana yang diharapkan lingkungannya. Apabila mereka



seorang pemimpin, baik di pemerintahan maupun di swasta, ada dua kemungkinan, ada pemimpin yang arif, tetapi ada juga pemimpin yang tirani. Golongan terakhir ini adalah manusia yang ketika sampai di puncak, hatinya kosong, tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan kekayaan, kekuasaan dan kehormatan yang telah diperolehnya, kecuali untuk memuaskan dahaga nafsu kebutuhannya yang telah berubah menjadi keserakahan dan kesombongan.

Agar pendakian manusia ke puncak tidak sesat, maka di samping jenjang kebutuhan dari Abraham H.Maslov, manusia hendaknya juga mendaki

jenjang spiritual untuk kelak mencapai puncak spiritual seiring pencapaian puncak kebutuhannya. Di sepanjang perjalanan hidupnya, manusia seharusnya mengikuti jalan spiritual yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT, yang setiap saat dapat dilaksanakan atau diwujudkan dalam bentuk pola pikir, sikap mental dan perilaku keseharian, tanpa harus melakukan kegiatan ritual yang bersifat mistik dan hidup seperti gelandangan yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Perjalanan spiritual itu dapat dilakukan dalam hitungan hari, asal ada tekad yang besar, tanpa harus meninggalkan kegiatan sehari-hari dalam pekerjaan. Perjalanan spiritual itu adalah perjalanan hati.

Perjalanan spiritual itu pada tingkat pertama adalah tekad untuk *bertobat* dari semua perbuatan dosa dan tindakan maupun pikiran jahat dan maksiat. Tingkatan kedua adalah tekad untuk *hidup sederhana* dan membagi keberuntungan dengan sesama dan lingkungannya. Semakin banyak rezeki yang diterima, semakin banyak pula amalnya bagi sesama dan lingkungannya. Tingkatan ketiga adalah memupuk *kesabaran, keikhlasan* dan selalu *bersyukur* dalam menghadapi semua hal, baik yang menyenangkan maupun tidak, yang rumit maupun yang sederhana. Tingkatan ke-empat adalah *selalu* mendekatkan diri kepada Allah SWT setiap saat, di mana pun kita berada harus selalu mengingat-Nya dan setiap saat pula selalu membuka hati untuk menerima kasih sayang-Nya. Tingkatan terakhir adalah menumbuhkan kesadaran dan perasaan untuk *selalu bersama Allah SWT*, sehingga petunjuk-Nya dapat diterima secara langsung. Apabila pada pendakian fisik, bertambah tinggi orang mendaki, maka bertambah tinggi egonya, maka pada pendakian spiritual semakin tinggi pendakiannya, maka akan semakin rendah egonya.

Pendakian Fisik dan Spritual

HENDAKNYA pendakian fisik mencapai puncak harus dilakukan serentak dengan pendakian spiritual, sehingga apabila sudah sampai di puncak tidak terjadi kekosongan jiwa, karena secara bersamaan jenjang spiritual tertinggi pun

telah tercapai. Demikianlah perjalanan paralel dan seimbang yang harus ditempuh seseorang untuk menjadi pemimpin yang arif dan berakhlak mulia, yang menjadikan puncak karier sebagai peluang untuk lebih banyak beribadah kepada Allah SWT agar tindakan dan perilakunya bermanfaat buat kemaslahatan seluruh ummat manusia dan alam di sekelilingnya.

Banyak orang yang merugi karena tidak tahu jalan yang harus ditempuh, maka sangatlah beruntung bagi mereka yang memperoleh jalan lurus, sekaligus dua jalur, yang satu, jalur menuju puncak kejayaan duniawi dan jalur kedua, menuju puncak kenikmatan akhirat. Mereka beruntung karena sekaligus disadarkan akan makna dan tugas hidup, bahwa hidup itu punya akhir dan pada akhir kehidupan, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya sebagai khalifah di bumi dan sebagai hamba Allah yang selalu mengingat-Nya.

Puncak perjalanan fisik bersifat relatif, bisa tinggi sekali, tetapi juga bisa biasa-biasa saja, karena sukses duniawi itu ada di mana-mana. Tetapi puncak perjalanan spiritual, semuanya sama, yaitu sama-sama menuju pertemuan dengan Allah SWT seperti yang dijanjikan bagi mereka yang terpilih (lihat Wahyono S.K, *Mempersiapkan Perjalanan Menuju Allah*, 2006).

Mudah-mudahan setelah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan menuju puncak, kita semua dapat menemukan jalan untuk kembali pulang kepada-Nya. Mudah-mudahan kita juga menyadari bahwa pencapaian puncak itu bukan karena kita yang hebat, tetapi semata-mata karena kehendak Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

Katakanlah: "Ya Allah, Engkau yang mempunyai Kerajaan, Engkau berikan Kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut Kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau binakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".

(QS.Ali Imran 3:26)

**MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**

SURAT TELEGRAM MARKAS BESAR TNI

NOMOR : ST/04/2010

TGL : 15 - 04 - 2010

- | | | | |
|-------|-----|---|---|
| AAA | TTK | DASAR TTK DUA | |
| | | SATU | TTK SURAT TELEGRAM DIRJEN RENHAN KEMHAN NO ST/04/2010 TGL 24 MAR 2010 TTG BIAYA PERAWATAN JENAZAH ANGG TNI/PURN TNI DAN ANGG PNS/WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI TTK |
| | | DUA | TTK SURAT TELEGRAM KAPUSKU TNI NO ST/04/2004 TGL 20 FEB 2004 TTG KENAIKAN BIAYA PERAWATAN JENAZAH ANGG TNI/PURN TNI DAN ANGG PNS/WREDATAMA DI LINGK UO MABES TNI TTK |
| | | TIGA | TTK SURAT TELEGRAM KAPUSKU KEMHAN NO ST/035/2010 TGL 1 APR 2010 TTG KENAIKAN BIAYA PERAWATAN JENAZAH ANGG TNI/PURN TNI DAN ANGG PNS/WREDATAMA DI LINGK KEMHAN DAN TNI TTK |
| BBB | TTK | SEHUB DASAR TSB DI ATAS KMA KPD TSB ALAMAT DIBERITAHUKAN BHW TMT JAM 2010 BIAYA PERAWATAN JENAZAH ANGG TNI/PURN TNI DAN ANGG PNS/WREDATAMA DI LINGK UO MABES TNI YG SEMULA RP 2.000.000,- PER JENAZAH DINAIKKAN MENJADI RP 8.500.000,- PER JENAZAH DGN RINCIAN PENGGUNAAN SBB TTK DUA | |
| SATU | TTK | PEMBELIAN PETI JENAZAH | RP 1.500.000,- TTK |
| DUA | TTK | PERAWATAN JENAZAH | RP 1.000.000,- TTK |
| TIGA | TTK | UPACARA PEMAKAMAN | RP 1.000.000,- TTK |
| EMPAT | TTK | BANTUAN KPD KELUARGA | RP 5.000.000,- TTK |
| CCC | TTK | DGN DIBELAKUKANNYA SURAT TELEGRAM INI MAKA SURAT TELEGRAM KAPUSKU TNI NO ST/04/2004 TGL 20 FEB 2004 DINYATAKAN TDK BERLAKU LAGI TTK | |
| DDD | TTK | ST INI MERUPAKAN PEDOMAN UTK DILAKS TTK | |

KAPUSKU TNI

AMRUDDIN S, S.IP
BRIGJEN TNI

SURAT-SURAT YANG DIPERLUKAN

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. | FOTO COPY SKEP PENSUN | = 7 LEMBAR |
| 2. | FOTO COPY KARTU KARIP TASPEN | = 7 LEMBAR |
| 3. | FOTO COPY BUKU PEMBAYARAN PENSUN | = 7 LEMBAR |
| 4. | FOTO COPY SURAT NIKAH/AKTE NIKAH | = 7 LEMBAR LEGALISIR LURAH |
| 5. | FOTO COPY KPI (KARTU PETUNJUK ISTERI) | = 7 LEMBAR |
| 6. | FOTO CIPY BINTANG JASA | = 7 LEMBAR |
| 7. | FOTO COPY KTP | = 7 LEMBAR |
| 8. | FOTO COPY KK | = 7 LEMBAR |
| 9. | FOTO COPY SURAT KEMATIAN | = 7 LEMBAR LEGALISIR LURAH |

UNTUK MENGURUS TERSEBUT MELALUI GARNISUN



**Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia
turut berduka cita atas meninggalnya :**

- Bapak H. Abdul Moeis. Mantan WK.Ketua DPD LVRI Prop. Riau 24 Agustus 2010
- Burhanuddin. Bendahara DPD LVRI Prop. Riau, 12 Agustus 2010
- Surono Reksodimedjo. Jenderal TNI(PURN)Mantan MENKO POLKAM, 06 Agustus 2010
- Sinta Tarigan. Anggota DPR LVRI Kec. Gunung Merah, 05 Juli 2010
- Mesin Ginting.Sekretaris DPR LVRI Kec. Namo Rambe, 17 Juli 2010
- Menyun. Anggota DPR LVRI Kec. PERVUT SEI TUAN, 26 Juni 2010
- Perai Br Tarigan. Anggota Mantan LVRI Kec. STM Hilir, 10 Juni 2010
- Sakimun. KABAG UUMU/SO SBUD MARAN LVRI Kec.Biru-Biru, 23 Juni 2010
- Bpk.Letkol Mar (PURN) Soekotjo Soemantri. Mantan Pengurus DPD LVRI Prop Jawa Timur,
21 Juli 2010
- Letjen TNI (PURN) Achmad Kemal Idris,. 30 Juli 2010
- H. Ramli Haji.Ketua DPC LVRI Kodya Sabang, 12 Juli 2010
- Laksamana TNI Rudolf Kasenda. 12 Juli 2010
- Kolonel (PURN) Sidharta. Ketua Dewan Pertimbangan Cabang LVRI Kab/Kota Kidiri,
23 Juni 2010
- Bpk.H. Tjakra Sumarna. Anggota DPD LVRI Prop. Jawa Barat, 11 Juni 2010
- Kombes POL (PURN) H. Soelardjo. Wakil Ketua III DPD LVRI Prop.Jatim, 03 Juni 2010
- Mayoor Purn S. Suherman. Anggota DPC LVRI Kab. Ciamis, 04 Juni 2010
- Adenan Danu Poyo. Anggota DPC LVRI Kec. Manado, 02 Juni 2010
- Bpk.I Gede Putu Jasa Widjaja. Anggota LVRI Prop. Bali, 29 Mei 2010
- Amin. Anggota DPC LVRI Kab. Sambas, 16 Juni 2010

Semoga amal perjuangannya di teruskan oleh generasi muda kita



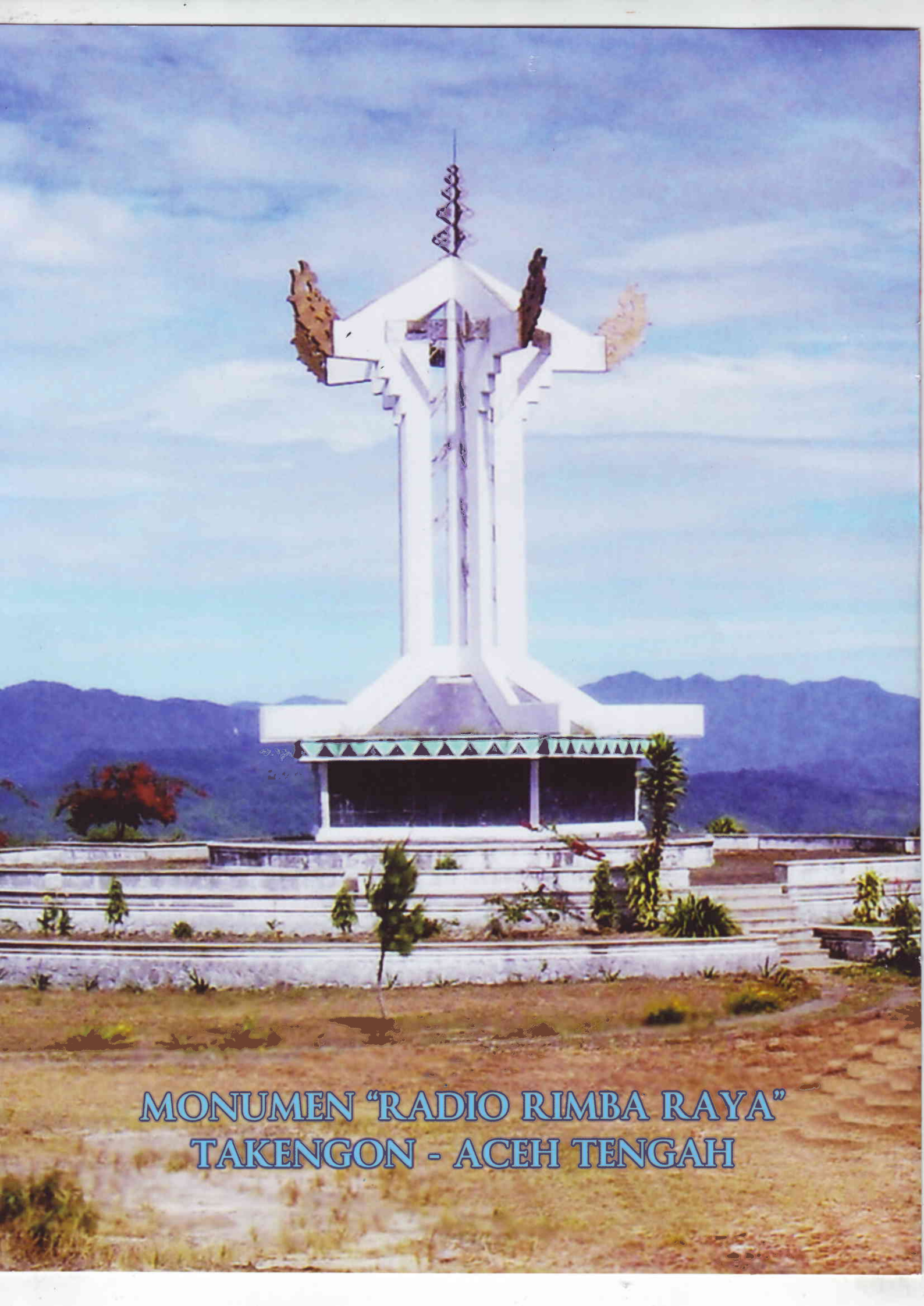
Kami cuma tulang-tulang berserakan

Tapi adalah kepunyaanmu

Apakah engkau memelihara

Pusara kami????

(TMP Cikutra Bandung, Juli 2010)



**MONUMEN "RADIO RIMBA RAYA"
TAKENGON - ACEH TENGAH**